

**ANALISIS KEBIJAKAN BERAS MISKIN TERHADAP
KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA DI
KABUPATEN TAKALAR (STUDI KASUS
DESA PARANGBADDO KECAMATAN
POLONGBANGKENG UTARA)**

SKRIPSI

Oleh
PRATIWI
105710201614



**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
1439 H/2018 M**

**ANALISIS KEBIJAKAN BERAS MISKIN TERHADAP
KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA DI
KABUPATEN TAKALAR (STUDI KASUS
DESA PARANGBADDO KECAMATAN
POLONGBANGKENG UTARA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Jurusan
Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

Disusun Oleh :

**PRATIWI
105710201614**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
1439 H/2018 M**

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah Ini Saya Persembahkan
Kepada Kedua Orang Tua Saya yang Tercinta
ALIMUDDIN dan **DINARTI**
yang Senantiasa Memberikan Do'a, Dukungan
dan Kasih SayangNya Kepada Saya,
dan Untuk Orang-Orang Terdekat Saya
Yaitu Sahabat-Sahabat Saya yang Tersayang
Terima Kasih Atas Segala Dukungan dan Motivasi Selama Ini
Sehingga Saya Mampu Menyelesaikan Studi Dengan Baik
dan Tak Lupa Pula Saya Panjatkan Puji Syukur
Kepada **Tuhan Yang Maha Esa** Atas Segala Nikmat_Nya.

MOTO HIDUP

Memulai Dengan Penuh Keyakinan
Menjalankan Dengan Penuh Keikhlasan
Menyelesaikan Dengan Penuh Kebahagiaan
dan
Lebih Baik Merasakan Sulitnya
Pendidikan Saat Ini Dari Pada Merasakan
Pahitnya Kebodohan Kelak Nanti



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN IESP**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Analisis Kebijakan Raskin (Beras Miskin) Terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Kabupaten Takalar (Studi Kasus Desa Parangbaddo Kecamatan Polongbangkeng Utara)"

Nama Mahasiswa : Pratiwi
No Stambuk/NIM : 105710201614
Program Studi : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenjang Studi : Strata Satu (S1)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan panitia penguji skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018..

Makassar, 13 Agustus 2018

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

H. Sultan Sarda, SE., MM
NIDN : 0015075903

Pembimbing II,

Asdar, SE., M. Si
NIDN : 0903039102

Diketahui :

Dekan,
Fakultas Ekonomi & Bisnis

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903078

Ketua,

Jurusan IESP

Hi. Naidah, SE., M. Si,
NBM: 710561



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN IESP
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama Pratiwi, Nim : 105710201614, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomer : 0004/SK-Y/60201/091004/2018 M, Tanggal 29 Dzulkaidah 1439 H / 11 Agustus 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

29 Dzulkaidah 1439 H
Makassar, _____

11 Agustus 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....)
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim, HR, SE., MM. (.....)
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Hj. Naidah, SE., M. Si, (.....)
2. Dr. H. Muhammad Rusydi, SE., M.Si (.....)
3. Dr. Andi Jam'an, SE., MM (.....)
4. Asdar, SE., M. Si (.....)

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903078

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Kebijakan Raskin Terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Kabupaten Takalar (Studi Kasus di Desa Parangbaddo Kecamatan Polongbangkeng Utara)”**.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Alimuddin dan ibu Dinarti yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Bapak Ismail Rosullong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Hj. Naidah, SE., M. Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak H. Sultan Sarda, SE., MM, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Kakanda Asdar, SE., M.Si selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu asisten Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Angkatan 2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karna itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Makassar, 11 Agustus 2018

Pratiwi

ABSTRAK

Pratiwi, 105710201614, Tahun 2018, Analisis Kebijakan Raskin Terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Kabupaten Takalar (Studi Kasus Desa Parangbaddo Kecamatan Polongbangkeng Utara), Skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Bapak H. Sultan Sarda, Selaku Pembimbing I dan Asdar, Selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pencapaian indikator 6 Tepat (tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi) dalam pelaksanaan penyaluran Raskin serta menjelaskan proses pendistribusian Raskin untuk masyarakat berpendapatan rendah di Desa Parangbaddo Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Untuk mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan program Raskin sebagai unit analisis. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dan data sekunder diperoleh melalui media perantara yang berupa buku, catatan, atau arsip-arsip yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendistribusian Raskin adalah adanya alur secara bertahap atau melalui jalur administrasi kewilayahan yang ada di Kabupaten Takalar yaitu melalui Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Takalar, Kecamatan Polongbangkeng Utara, kemudian Desa/Kelurahan Parangbaddo hingga akhirnya dapat disalurkan langsung kepada masyarakat. Sedangkan mengenai indikator 6 Tepat dalam pelaksanaan penyaluran Raskin di Desa Parangbaddo Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar belum sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan oleh ketidakakuratan pemerintah dalam penetapan data rumah tangga sasaran penerima manfaat dan kurangnya koordinasi antara pihak penyelenggara pelaksanaan distribusi Raskin serta kurangnya pengawasan dari pejabat yang berwenang terhadap proses penyaluran Raskin.

Kata Kunci : Kebijakan Raskin dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga.

ABSTRACT

Pratiwi, 105710201614, Year 2018, Analysis of Raskin's Policy on Household Food Resilience in Takalar District (Case Study of Parangbaddo Village Kecamatan Polongbangkeng Utara), Thesis of Economic Studies Program of Development Studies Faculty of Economics and Business Muhammadiyah University of Makassar. Guided By Mr. H. Sultan Sarda, As Advisor I and Asdar Syahputra, As Supervisor II.

This study aims to explain the achievement of indicators of 6 Precise (right target, correct quantity, exact price, timely, proper quality and proper administration) in the implementation of Raskin distribution and explain the process of distributing Raskin to low income communities in Parangbaddo Village Kecamatan Polongbangkeng Utara Takalar District. To achieve this objective, the research implementation used descriptive qualitative approach with Raskin program as unit of analysis. Data sources consist of primary data obtained through observation, interview and documentation and secondary data obtained through intermediate media in the form of books, notes, or archives relating to problems in research.

The results showed that the Raskin distribution process was gradual or through the regional administrative channels in Takalar District through South Sulawesi Provincial Government, Takalar District Government, Polongbangkeng Utara Sub-District, and Village / Parangbaddo Sub-District until finally distributed directly to the community. While the indicator of 6 Exactly in the implementation of Raskin distribution in the Village District Parangbaddo Polongbangkeng Takalar District has not been fully achieved. This is due to government inaccuracies in determining beneficiary household data and lack of coordination between the organizers of Raskin distribution and lack of supervision from the Authorized Officials on the Raskin distribution process.

Keywords: Raskin Policy and Household Food Security.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTO	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB. II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Teori	9
1. Pengertian Implementasi Kebijakan	9
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)	10
3. Tinjauan Umum Tentang Program Beras untuk Rumah	

Tangga Miskin (Raskin)	12
4. Ketahanan Pangan	16
5. Rumah Tangga	20
B. Tinjauan Empiris	21
C. Kerangka Konsep	25
BAB. III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Fokus Penelitian	26
C. Lokasi dan Situs Penelitian	27
D. Sumber Data	28
E. Pengumpulan Data	29
F. Instrumen Penelitian	31
G. Teknik Analisis	32
BAB. IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	34
1. Gambaran Umum Kabupaten Takalar.....	34
2. Gambaran Umum Kecamatan Polongbangkeng Utara	42
3. Gambaran Umum Desa Parangbaddo	48
B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)	50
1. Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Desa Parangbaddo.....	50
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Program Beras Miskin (Raskin) di Desa/Kelurahan Parangbaddo	61
3. Proses Pendistribusian Beras Bersubsidi untuk Masyarakat B berpendapatan Rendah (Raskin)	65

C. Analisis dan Interpretasi (Pembahasan)	66
1. Proses Pendistribusian Beras Bersubsidi untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) di Desa Parangbaddo Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar	67
2. Indikator Enam Tepat (6T) Pelaksanaan Raskin pada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Desa Parangbaddo Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar	68
BAB. V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 1.1	Pagu Alokasi Beras untuk Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera (Rastra/Raskin) di Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar Pada Tahun 2017.	5
Tabel 1.2	Pagu Alokasi Beras untuk Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera (Rastra/Raskin) di Desa Parangbaddo Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar Pada Tahun 2017.	6
Tabel 4.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Takalar, Tahun 2016.	35
Tabel 4.2	Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Takalar, Tahun 2016.	36
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Takalar, Tahun 2016.	37
Tabel 4.4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Takalar, Tahun 2012-2017.	39
Tabel 4.5	Jumlah Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Takalar, Tahun 2014 – 2016.	41
Tabel 4.6	Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Polongbangkeng Utara, Tahun 2016.	43
Tabel 4.7	Jarak dari Desa/Kelurahan ke Ibukota Kecamatan dan Kabupaten di Kecamatan Polongbangkeng Utara (Km), Tahun 2016.	44
Tabel 4.8	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Polongbangkeng Utara, Tahun 2016	45
Tabel 4.9	Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Polongbangkeng Utara, Tahun 2016.	46

Tabel 4.10	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Polongbangkeng Utara, Tahun 2016.	47
Tabel 4.11	Tahapan Proses Penyaluran Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin)	51
Tabel 4.12	Daftar Nama-Nama Kepala Keluarga yang Menerima Raskin di Desa/Kelurahan Parangbaddo Tahun 2017.	60

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Bagan Kerangka Pikir	25
Gambar 4.1	Peta Wilayah Kabupaten Takalar	35
Gambar 4.2	Jumlah Penduduk Miskin dan Angka Kemiskinan di Kabupaten Takalar, Tahun 2012-2017.	38
Gambar 4.3	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln) Kabupaten Takalar Tahun 2012-2017.	40
Gambar 4.4	Peta Wilayah Kecamatan Polongbengkeng Utara.	43
Gambar 4.5	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Parangbaddo Kecamatan Polongbengkeng Utara Kabupaten Takalar (Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014).	49

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Pedoman Wawancara
2. Lampiran Informan
3. Permohonan Izin Penelitian
4. Surat P
5. ernyataan Penelitian

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan hal mendasar yang dilakukan setiap negara untuk terus mensejahterakan dan memajukan kehidupan warga negaranya. Pada hakekatnya negara melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa secara utuh dan menyeluruh tanpa membedakan suku, agama, dan jenis kelamin. Dalam undang-undang Dasar 1945, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, karena sering kali terdengar istilah pembangunan oleh rakyat dan untuk rakyat.

Salah satu masalah utama yang dihadapi Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan adalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan Indonesia yang tinggi sangat mempengaruhi proses pembangunan. Kemiskinan menunjukkan dan menyebabkan kualitas sumber daya manusia yang rendah karena berbagai kebijakan pemerintah lewat berbagai program pembangunan yang termasuk di dalamnya (inklusif), terus dilakukan oleh pemerintah antara jurang antara si kaya dan si miskin tidak semakin lebar. Meskipun telah demikian kemiskinan masih terus menjadi masalah yang mempengaruhi kemajuan dan peningkatan berbagai bidang pembangunan di Indonesia.

Dalam konteks pembangunan yang berkeadilan, konsep kebijakan pembangunan telah dirumuskan dan dilaksanakan ke berbagai instrument program dan proyek. pada pengentasan kemiskinan, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah agar tingkat kemiskinan dapat menurun. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai bentuk kebijakan dan produk hukum yang diturunkan

dalam bentuk program-program pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, bantuan sosial langsung yang berbasis keluarga dan masih banyak lagi.

Wanggai (2012:21) menuliskan bahwa intervensi pengurangan kemiskinan oleh pemerintah, dikelola ke dalam tiga kluster besar:

1. Kluster I (satu), yaitu bantuan sosial berbasis keluarga. Dalam hal ini ada bantuan sosial bersyarat, program keluarga harapan (PKH), jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) serta langkah-langkah subsidi dan bantuan sosial lainnya yang langsung menyentuh rakyat kebanyakan secara langsung.
2. Kluster II (dua), yang memuat intervensi pemberdayaan masyarakat seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
3. Kluster III (tiga), yaitu program pengembangan ekonomi lokal seperti Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan komponen program lainnya.

Sebagai realisasi pengurangan kemiskinan, program-program diatas telah dan terus dilakukan oleh pemerintah, meski demikian kemiskinan masih saja tetap menjadi penghambat dalam pembangunan.

Salah satu program nasional dalam program bantuan sosial langsung kepada masyarakat adalah pemberian Beras untuk keluarga miskin (Raskin) untuk masyarakat miskin. Oleh karena itu, pada tahun 2002 pemerintah Indonesia meluncurkan Program Raskin yang merupakan implementasi dari konsistensi pemerintah dalam rangka memenuhi hak pangan masyarakat. Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk

meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran.

Program ini sudah ada sejak krisis pangan di Indonesia pada tahun 1998 yang dinamakan dengan Operasi Pasar Khusus (OPK). Namun, baru pada tahun 2002 program OPK ini diubah namanya menjadi program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) dan pada tahun 2008 menjadi beras bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah (Raskin).

Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pokok dalam bentuk beras. Selain itu, Raskin bertujuan untuk meningkatkan dan membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan. Keluarga penerima manfaat Raskin yaitu keluarga yang berpendapatan rendah (miskin dan rentan miskin) atau disebut dengan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).

Program Raskin adalah program rasional lintas sektoral baik vertikal (Pemerintah Pusat Sampai Dengan Pemerintah Daerah) maupun horizontal (Lintas Kementrian/Lembaga), sehingga semua pihak yang terkait bertanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan dan pencapaian tujuan program Raskin.

Masing-masing keluarga miskin akan menerima beras sebesar 15 Kg/RTS/bulan atau setara dengan 180 Kg/RTS/tahun dengan harga tebus Rp 1.600,00/Kg.⁹ Namun, dalam prakteknya program Raskin ini masih belum sesuai harapan karena masih banyak beras Raskin yang dibagikan secara merata atau dibagikan kepada semua masyarakat.

Mekanisme pembagian Raskin di Desa Parangbaddo Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, dimulai dengan pengiriman beras yang berasal dari Perum Bulog ke balai Desa Parangbaddo lalu disalurkan ke masing-masing RT. Melalui ketua setiap RT, beras Raskin tersebut disalurkan kepada warga. Namun, beras yang diterima oleh masyarakat miskin di Desa Parangbaddo tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan yaitu rata-rata menyusut menjadi 2,5 – 4 Kg/RTS/bulan dengan harga tebus sebesar Rp 1.600/Kg di titik distribusi dan rata-rata Rp 2.000/Kg di titik bagi. Hal ini disebabkan karena Raskin didistribusikan dengan kebijakan bagi rata sehingga Raskin juga dinikmati oleh masyarakat yang tidak miskin yang akhirnya menyebabkan hak yang diterima oleh masyarakat yang miskin menjadi berkurang.

Kebijakan pendistribusian Raskin secara bagi rata di Desa Parangbaddo tersebut nampaknya telah berjalan bertahun-tahun. Hal ini terjadi dimungkinkan adanya kecemburuan sosial oleh warga yang tidak menerima Raskin dan menuntut kepala desa untuk membagi beras Raskin secara merata.

Masalahnya adalah bahwa praktek pendistribusian Raskin dengan sistem bagi rata di Desa Parangbaddo tidak sesuai dengan aturan sebagaimana mestinya karena tidak terpenuhinya tujuan utama Raskin yang telah dijelaskan di atas yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Alasan berikutnya adalah tidak terlaksananya distribusi Raskin dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Pedoman Umum Raskin yaitu 15 Kg/RTS/bulan sehingga beras yang diterima oleh masyarakat miskin menjadi berkurang dan berarti hak yang diterimanya juga berkurang.

Pagu Alokasi Beras Untuk Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera (Rastra/Raskin) di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Pada Tahun 2017.

Tabel 1.1
Pagu Alokasi Beras Untuk Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera (Rastra/Raskin) di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Pada Tahun 2017.

Bulan	Jumlah (Kg)
Januari	36.810
Februari	36.810
Maret	36.810
April	36.810
Mei	36.810
Juni	36.810
Juli	36.810
Agustus	36.810
September	36.810
Oktober	36.810
November	36.810
Desember	36.810
Total	441.720 Kg
Jumlah KK	2.454

Sumber : Data Desa Parangbaddo.

Pagu Alokasi Beras Untuk Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera (Rastra/Raskin) di Desa Parangbaddo Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Pada Tahun 2017.

Tabel 1.2
Pagu Alokasi Beras Untuk Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera (Rastra/Raskin) di Desa Parangbaddo Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Pada Tahun 2017.

Bulan	Jumlah (Kg)
Januari	825
Februari	825
Maret	825
April	825
Mei	825
Juni	825
Juli	825
Agustus	825
September	825
Oktober	825
November	825
Desember	825
Total	9.900 Kg
Jumlah KK	55

Sumber : Data Desa Parangbaddo.

Setiap kebijakan dan program pemerintah memiliki indikator keberhasilan dalam pelaksanaannya. Pada program Raskin, keberhasilan pelaksanaannya diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator Enam Tepat (6T), yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dilakukanlah penelitian dengan judul **"Analisis Kebijakan Raskin Terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Kabupten Takalar (Studi Kasus Desa Parangbaddo, Kecamatan Polongbangkeng Utara)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pendistribusian beras bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) di Desa Parangbaddo Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar?
2. Apakah indikator Enam Tepat (6T) dalam pelaksanaan Raskin kepada masyarakat telah berhasil tercapai di Desa Parangbaddo Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar?

C. Tujuan Penelitian

Dengan berdasar pada rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui proses pendistribusian beras bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) di Desa Parangbaddo Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.

2. Untuk mengetahui keberhasilan indikator Enam Tepat (6T) pelaksanaan Raskin pada rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) di Desa Parangbaddo Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari laporan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan suatu manfaat, baik langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi masukan positif dan manfaat bagi pemerintah khususnya pada bidang pelaksana program Raskin untuk menjadi bahan masukan pada perbaikan pelaksanaan Raskin di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.

2. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terlibat dalam praktek distribusi beras bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) secara merata di Desa Parangbaddo Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.

BAB. II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi Kebijakan pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil (Budi Winarno, 2012).

Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Selain itu, ancaman utama adalah konsistensi implementasi. (Riant Nugroho D, 2006:119).

Implementasi kebijakan memerlukan perangkat yang digunakan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan suatu program dengan kebijakan publik yang menjadi acuannya. Perdebatan yang muncul tentang persoalan implementasi kebijakan publik mengarah pada dua pendekatan, yaitu pendekatan *command and control* dan pendekatan *economic incentive (market)*. Pendekatan *command and control* menyertakan mekanisme yang nampak koersif untuk menyelaraskan pelaksanaan dengan kebijakan acuan. Sedangkan pendekatan *economic incentive* menggunakan sarana

perpajakan, subsidi, atau finalti agar pelaksanaan sesuai dengan kebijakan acuan. (Rahmat Alyakin Dachi, 2017:147)

Keberhasilan implementasi suatu program adalah hal yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Keberhasilan implementasi program itu sendiri merupakan cermin bahwa kebijakan program yang ada itu telah mencapai tujuan, atau dengan kata lain bahwa suatu kebijakan yang telah diberlakukan perlu diwujudkan dalam bentuk implementasi (suatu tindakan) untuk mencapai sasaran yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil yang nyata.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)

Pada dasarnya penelitian ini akan melihat bagaimana implementasi program beras untuk rumah tangga miskin (raskin) Di Desa Parangbaddo, Kabupaten Takalar. Selain itu juga diharapkan dapat mengidentifikasi beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program beras untuk rumah tangga miskin (Raskin). Faktor yang digunakan oleh penulis adalah faktor yang dikemukakan oleh Edward III dalam Yohana 32 Etabibue (1997:12) yang meliputi empat faktor yaitu: komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini hanya digunakan 3 faktor yaitu komunikasi, sumber daya, dan sikap pelaksana.

a. Komunikasi

Faktor ini dipilih karena kegiatan kebijakan raskin melibatkan berbagai instansi serta unsur masyarakat. Oleh sebab itu, untuk mencapai kesamaan persepsi dan kepaduan langkah, maka dipandang perlu komunikasi dalam organisasi pelaksana, antar organisasi atau pihak

pelaksana dengan pihak penerima program sehingga implementasi bisa berjalan.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan aspek penting dalam implementasi suatu program. Sumber daya akan berpengaruh secara langsung pada keberhasilan implementasi. Jadi berhasil tidaknya implementasi dipengaruhi oleh tersedia dengan baik (tercukupi) maka implementasi akan berhasil dan sebaliknya jika sumber daya tidak tersedia dengan baik maka implementasi bisa gagal atau terlaksana tetapi tidak efisien dan efektif. Sumber daya yang memadai sangat diperlukan dalam implementasi suatu program agar dapat berjalan dengan baik, tidak terkecuali dengan program Raskin, keberadaan sumber daya sangat menentukan keberhasilan implementasi program ini. Bagaimanapun bagusnyapun suatu kebijakan dirumuskan bila tidak didukung sumber daya yang cukup maka implementasi tersebut akan mengalami kegagalan.

c. Sikap Pelaksana

Selain itu sikap dari pelaksana juga merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi yang penting bagi implementasi kebijaksanaan tertentu, kemungkinan besar mereka melaksanakan sebagaimana yang telah diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Akan tetapi apabila tingkah laku pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, proses implementasi kebijakan semakin sulit. Kecenderungan-kecenderungan pelaksana bisa menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan. Dengan kata lain respon dari pelaksana akan sangat berpengaruh terhadap implementasi. Sering kali kegagalan

kebijaksanaan di sebabkan para pelaksana tidak memahami sepenuhnya atas kebijakan yang dihadapi untuk itu pelaksana harus memiliki persepsi yang baik terhadap program raskin.

3. Tinjauan Umum Tentang Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)

a. Pengertian dan Sejarah Program Raskin

Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu penyediaan sebagai kebutuhan pangan pokok keluarga miskin. Melalui pelaksanaan program raskin bersama program penanggulangan kemiskinan lainnya diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial rumah tangga. Selain itu program Raskin merupakan program transfer energi dalam bentuk kalori yang dapat mendukung program lainnya (Depdagri, 2005:1).

Penelitian yang berhubungan dengan masalah program beras bersubsidi (Raskin) memang bukan yang pertama kali. Sudah ada beberapa peneliti yang melakukan penelitian yang membahas masalah tersebut. Banyak upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan salah satunya melalui Program Beras Miskin (Raskin). Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pendapaian indikator 6T, yaitu: Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, dan Tepat

Administrasi. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu Raskin bertujuan untuk meningkatkan atau membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.

Guna mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, pemerintah telah mencanangkan berbagai program kompensasi. Salah satu program kompensasi tersebut adalah Raskin. Program Raskin adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah.

Penyaluran Raskin sudah dimulai sejak 1998. Krisis moneter tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan Raskin. Pada awalnya disebut Program Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian diubah menjadi Raskin mulai tahun 2002. Fungsi Raskin diperluas sehingga tidak lagi menjadi program darurat (*social safety net*) melainkan sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat. Melalui sebuah kajian ilmiah, penamaan Raskin menjadi nama program diharapkan akan menjadi lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan Raskin itu sendiri.

b. Tujuan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)

Tujuan program Raskin adalah memberikan bantuan dan meningkatkan/membuka akses pangan keluarga miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan beras sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan di tingkat keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga

penerima manfaat pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Tujuan lain dari Program Raskin untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Program raskin juga bertujuan untuk membantu kelompok miskin dan rentan miskin mendapat cukup pangan dan nutrisi karbohidrat tanpa kendala. Efektivitas Raskin sebagai perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada kecupan nilai transfer pendapatan dan ketepatan sasaran kepada kelompok miskin dan rentan.

c. Sasaran Penerima Raskin

Penentu kriteria penerima manfaat Raskin seringkali menjadi persoalan yang rumit. Dinamika data kemiskinan memerlukan adanya kebijakan lokal melalui musyawarah Desa/Kelurahan (Mudes/Muskel). Musyawarah ini menjadi kekuatan utama program untuk memberikan keadilan bagi sesama Rumah Tangga Miskin (RTM).

Penyaluran Raskin atau Beras Sejahtera (Rastra) forum Bulog sub Drive Makassar tahun 2018 sebanyak 11 Ton yang berlangsung di halaman Kantor Bulog GSP Palleko Lingkungan Palleko 1 Kelurahan Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Pelepasan Raskin dari perumahan Bulog untuk Kecamatan Polongbangkeng Utara ditandai dengan pengangkatan bendera sebagai tanda pelepasan dan disaksikan langsung oleh pihak Bulog, Sebelum melepas secara resmi truk pengangkut Raskin sekaligus menyerahkan

beras tersebut secara simbolis kepada warga sasaran, terlebih dahulu bupati mengecek kualitas beras yang akan dibagikan.

Bupati Takalar dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kerjasama Pemda dan pihak Bulog serta semua yang terlibat dalam pelaksanaannya. Pemerintah Takalar di tahun 2018 ini akan menggandeng para pengusaha untuk bisa membantu dan bekerjasama untuk meningkatkan pertanian Kabupaten Takalar.

d. Distribusi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)

Titik distribusi adalah tempat di Desa/Kelurahan yang dapat dijangkau keluarga sasaran penerima manfaat. Pelaksana distribusi adalah Aparat Desa/Kelurahan yang dibantu oleh warga masyarakat setempat dan ditunjukkan oleh kepala Desa/Lurah.

Penentuan keluarga sasaran penerima manfaat adalah berdasarkan surat keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan pagu Raskin dan jumlah keluarga sasaran penerima manfaat melalui musyawarah Desa/Kelurahan menggunakan data dasar keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera. Musyawarah Desa/Kelurahan untuk memilih keluarga sasaran penerima manfaat melibatkan Aparat Desa/Kelurahan, (termasuk kepala Dusun/Lingkungan, RW, RT), anggota Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan, Institusi Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, tokoh masyarakat dan perwakilan keluarga miskin. Keluarga sasaran penerima manfaat yang dipilih dalam musyawarah Desa/Kelurahan yang dilampiri daftar keluarga sasaran penerima manfaat (format Model DPM-1) dan ditanda tangani kepala Desa/Lurah serta disahkan oleh Camat setempat.

Indikator kinerja pelaksanaan Raskin Enam Tepat (6T) adalah: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi. (Depdagri, 2009;5)

- a. Tepat sasaran yaitu Raskin hanya diberikan kepada keluarga sasaran penerima manfaat yang terdaftar dalam daftar penerima manfaat.
- b. Tepat jumlah yaitu jumlah beras yang dibeli keluarga Sasaran Penerima Manfaat sesuai hasil keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.
- c. Tepat harga yaitu harga beras yang dibayar oleh keluarga sasaran penerima manfaat sebesar Rp. 1.600/Kg di titik distribusi.
- d. Tepat waktu yaitu waktu pelaksana distribusi beras kepada keluarga sasaran penerima manfaat sesuai dengan rencana distribusi.
- e. Tepat kualitas yaitu terpenuhinya persyaratan kualitas medium kondisi baik dan tidak berhama sesuai dengan standar kualitas pembelian pemerintah sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan.
- f. Tepat administrasi yaitu terpenuhinya persyaratan administrasi yang diperlukan untuk penyelesaian subsidi dan pembayaran harga beras secara benar dan tepat waktu.

4. Ketahanan Pangan

Pangan merupakan istilah yang amat penting bagi pertanian karena secara hakiki pangan merupakan salah satu kebutuhan paling dasar dalam pemenuhan aspirasi humanistik. Masalah konsumsi pangan dan pemenuhannya akan tetap merupakan agenda penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Status konsumsi pangan penduduk sering dipakai

sebagai salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat. Krisis penyediaan pangan akan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial-politik. Oleh karena itu, mendiskusikan topik ketahanan pangan menjadi sangat penting.

Ketahanan pangan bagi suatu negara merupakan hal yang sangat penting, terutama bagi negara yang mempunyai penduduk sangat banyak seperti Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 220 juta jiwa pada tahun 2020 dan diproyeksikan 270 juta jiwa pada tahun 2025. Pengalaman sejarah pembangunan Indonesia menunjukkan bahwa masalah ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan stabilitas ekonomi (khususnya inflasi), biaya produksi ekonomi agregat (biaya hidup), dan stabilitas politik nasional. Oleh karena itu, ketahanan pangan menjadi syarat mutlak bagi penyelenggaraan pembangunan nasional.

Pasal 1 ayat 17 undang-undang pangan (UU No. 7/1996) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup dalam jumlah, mutu, aman, merata, dan terjangkau. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata, dan terjangkau. Hal itu diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan.

Kebijakan yang lebih tepat dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan adalah dengan mengubah *image* masyarakat untuk tidak menjadikan beras sebagai makanan pokok dan mulai beralih dari beras ke makanan lokal yang lain.

1) Pemberdayaan Petani dalam Rangka Pemantapan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadinya ketergantungan pada pihak manapun. Dalam hal inilah, petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan, petani adalah produsen pangan dan petani adalah juga sekaligus kelompok konsumen terbesar yang sebagian masih miskin dan membutuhkan daya beli yang cukup untuk membeli pangan. Petani harus memiliki kemampuan untuk memproduksi pangan sekaligus juga harus memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri.

2) Diversifikasi dan Ketahanan Pangan

Melalui sub sistem usaha tani dan agroindustri pangan, pengembangan diversifikasi pangan ke arah bahan pangan lokal dapat berkontribusi besar dalam peningkatan dan pemerataan pendapatan, dan perluasan kesempatan kerja karena melibatkan sebagian besar industri rumah tangga, skala kecil, dan menengah. Dengan diversifikasi pangan, stabilitas sistem ketahanan pangan menjadi lebih baik. Strategi kebijakan dan program akselerasi pengembangan diversifikasi pangan bertumpu pada prinsip bahwa produksi, agroindustri, konsumsi adalah satu sistem utuh yang antar komponennya sinergis. Berpijak dari pengalaman empiris

selama ini, kunci sukses pengembangan diversifikasi pangan terletak pada komitmen politik serta konsistensi dan ketuntasan dalam kebijakan dan program.

3) Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan

Pemantapan ketahanan pangan dapat dilakukan dengan upaya-upaya, yaitu peningkatan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga dengan mengembangkan komoditas pangan lokal sesuai potensi sumber daya dan pola konsumsi setempat, peningkatan produktivitas pertanian melalui akselerasi pemanfaatan teknologi sesuai dengan kapasitas sumber daya manusia setempat, pembinaan dan pendampingan secara intensif dan berkelanjutan pada program-program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, menguatkan jejaring kerja dan komitmen seluruh pemangku kepentingan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ketahanan pangan rumah tangga, dan upaya pemantapan ketahanan pangan dan penanganan rawan pangan di tingkat rumah tangga.

Menurut (Rita Hanafie, 2010:272) Strategi yang diterapkan dalam rangka keberhasilan pembangunan ketahanan pangan adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat.
2. Pengembangan sistem dan usaha agribisnis.
3. Mewujudkan kebersamaan antara masyarakat sebagai pelaku dan pemerintah sebagai fasilitator.
4. Menumbuhkan ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga, mengelola produksi pangan dengan baik dalam memenuhi kebutuhan konsumsi

keluarga, dan mampu menyalurkan kelebihan produksi pangan untuk memperoleh harga yang wajar.

5. Pemantapan koordinasi dan sinkronisasi pihak-pihak terkait dalam perencanaan, kebijakan, pembinaan, dan pengendalian.

Ada 2 cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan ketahanan pangan, antara lain:

1. Meningkatkan daya beli masyarakat miskin dengan menaikkan tingkat produksi pangan secara keseluruhan. Peningkatan *supply* pangan dari daya beli masyarakat merupakan hal yang baik mudah karena terkait dengan kebijakan yang akan dilakukan oleh suatu negara.
2. Pendistribusian kembali *supply* pangan dari daerah surplus ke daerah defisit pangan dengan menggunakan mekanisme yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang kekurangan pangan, selain menaikkan insentif untuk meningkatkan produksi pangan dalam jangka panjang.

5. Rumah Tangga

Rumah tangga menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid 1 (1990) adalah tempat tinggal atau bangunan untuk tinggal manusia. Rumah tangga memiliki pengertian tempat tinggal beserta penghuninya dan segala yang ada di dalamnya. Rumah tangga adalah unit perumahan dasar dimana produksi ekonomi, konsumsi, warisan, membesarkan anak, dan tempat tinggal yang terorganisasi dan dilaksanakan.

Pengertian rumah tangga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah atau yang berkenaan dengan keluarga.

Jenis rumah tangga terdiri dari dua (2) kategori dan dibedakan menurut jenis pemukiman, yaitu rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus. Rumah tangga biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Rumah tangga terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Sedangkan Rumah tangga khusus terdiri dari orang-orang yang tinggal di asrama yaitu tempat tinggal yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya diatur oleh suatu yayasan atau badan. Orang-orang yang tinggal di lembaga permasyarakatan, panti asuhan, dan rumah tahanan. Sekelompok orang yang mondok dengan makan yang berjumlah lebih besar atau sama dengan sepuluh orang.

Rumah tangga termasuk juga seorang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi makannya diurus sendiri. Keluarga yang tinggal pada dua bangunan sensus tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus terdapat dalam blok yang sama. Pondokan dengan pemondoknya kurang dari 10 orang. Pemondokan dianggap sebagai anggota rumah tangga induk. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

B. Tinjauan Empiris

Terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, berikut ini peneliti sajikan hasil penelitian terdahulu atau yang relevan seperti dapat dilihat pada uraian di bawah ini :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Winria Pitapurwati yang berjudul: *“Pelaksanaan Penyaluran Raskin Di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa”* pada tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pencapaian indikator 6 Tepat (tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi) dalam pelaksanaan penyaluran Raskin di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa. Untuk mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan program Raskin sebagai unit analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator 6T dalam pelaksanaan penyaluran Raskin di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa belum sepenuhnya tercapai secara maksimal. Hal disebabkan oleh ketidakakuratan data rumah tangga sasaran penerima Raskin dan rendahnya pengetahuan akan prosedur dan tujuan pelaksanaan penyaluran Raskin.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmin Rahim yang berjudul: *“Kebijakan Pemerintah Dan Penanganan Kemiskinan (Studi Tentang Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Di Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)”* pada tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu raskin bertujuan untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan data dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Hasil penelitian

menggambarkan implementasi Program Beras untuk Keluarga miskin (Raskin) di Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa belum berjalan sesuai dengan yang di harapkan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Singgih Panggayuh yang berjudul: *“Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik”* pada tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas pengelolaan program Raskin terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Peneliti menggunakan metode analisis regresi linier untuk mengetahui hubungan kausalitas antara efektivitas pengelolaan program raskin dengan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas pengelolaan program raskin sangatlah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat miskin yang disebut sebagai Rumah Tangga Miskin (RTM) hal ini ditunjukkan dengan nilai uji yang menunjukkan bahwa thitung dari variabel efektivitas pengelolaan program raskin adalah 32,001 dengan nilai signifikansi 0,000. Kemudian, kemampuan variabel efektivitas pengelolaan program raskin dalam mempengaruhi kesejahteraan masyarakat adalah sebesar 73,8%, sedangkan sisanya yang sebesar 26,2% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Hijriatul Mabruk yang berjudul: *“Implementasi program Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) Di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Nenglarasi Kota Tangerang”* pada tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan

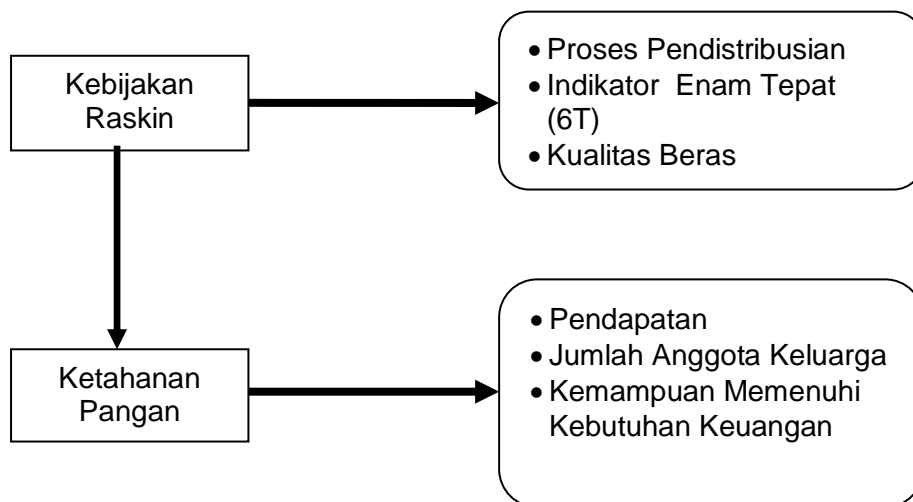
Neglasari Kota Tangerang, dalam mengatasi masalah penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 263 responden, dengan menggunakan rumus Slovin dimana metode penelitian ini untuk mengoperasionalkan variabel penelitian yaitu pendekatan kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang mencapai angka 75,31%. Hal ini membuktikan bahwa kinerja para pembuat dan pelaksana kebijakan program beras rumah tangga miskin bekerja maksimal karena mengingat untuk mensejahterakan warga miskin itu sangatlah susah, yang mana memang mayoritas penduduk secara umum berada di bawah garis kemiskinan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Yossy Herma Panjaya yang berjudul: *“evaluasi pelaksanaan program Raskin di Kota Semarang (studi kasus di Kelurahan Pedurungan Kidul)”* pada tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui validitas data rumah tangga miskin penerima bantuan program Raskin di Kelurahan Pedurungan Kidul, untuk mengetahui ketepatan sasaran program Raskin dalam upaya pengantasan kemiskinan di Kelurahan Pedurungan Kidul. Metode analisis data meliputi deskriptif komperatif dan wawancara terbuka serta dengan menggunakan rumus deskriptif persentase. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan deskriptif persentase untuk variabel validitas data rumah tangga miskin Kelurahan Pedurungan Kidul termasuk dalam kriteria sedang karena terdapat kesesuaian antara data rumah tangga miskin Kelurahan Pedurungan Kidul dengan keadaan riil rumah tangga miskin.

C. Kerangka Konsep

Kebijakan Raskin dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu proses pendistribusian, indikator enam tepat (6T), dan kualitas beras. Sedangkan Ketahanan pangan rumah tangga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pendapatan, jumlah anggota keluarga, dan kemampuan memenuhi kebutuhan. Pendapatan rumah tangga merupakan total penerimaan uang yang diterima setelah bekerja. Jumlah anggota keluarga adalah banyaknya anggota keluarga dalam suatu rumah tangga yang tinggal satu atap dan menjadi bagian tanggung jawab kepala keluarga dalam memenuhi konsumsi. Kemampuan memenuhi kebutuhan merupakan upaya rumah tangga untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka dapat digambarkan sebuah kerangka konsep seperti gambar 2.1 di bawah ini :



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB. III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah pendekatan kualitatif. Kualitatif dalam bentuk deskriptif yakni berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati dengan berdasarkan pada teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Alasan pemilihan pendekatan kualitatif dalam melakukan penelitian ini karena pada hakekatnya penelitian yang dilakukan bersifat menggambarkan atau mendeskripsikan fakta-fakta mengenai fenomena atau kenyataan sosial yang ditemui dimasyarakat, lalu melakukan analisa dan penafsiran hubungan fakta-fakta dengan isi dan konteks kebijakan serta melihat faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam program Raskin. Dengan adanya pendekatan kualitatif deskriptif ini juga memudahkan peneliti untuk memperoleh data yang berkaitan dengan konsep judul dan rumusan masalah yang telah dikemukakan pada pendahuluan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan guna memperjelas ruang lingkup pembahasan penelitian ini, sehingga terhindar dari pengumpulan data pada bidang yang sangat luas atau kurang relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian dilakukan dengan memperlihatkan isu kebijakan dan tujuan penelitian yang ada. Berdasarkan ukuran keberhasilan pelaksanaan Raskin oleh TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) maka penelitian difokuskan pada indikator Enam Tepat (6T), yaitu:

- 1) Tepat sasaran, dalam hal ini sasaran pelaksanaan Raskin yang dimaksud adalah keluarga miskin yang ada di Desa Parangbaddo, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
- 2) Tepat jumlah, jumlah yang dimaksud adalah jumlah beras yang diberikan pada keluarga miskin di Desa Parangbaddo, Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.
- 3) Tepat harga, yaitu harga yang diberikan pada masyarakat miskin sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.
- 4) Tepat waktu, yaitu kesesuaian waktu pemberian seharusnya dengan pelaksanaannya.
- 5) Tepat kualitas, dalam hal ini berkaitan dengan kualitas beras dari Bulog yang diberikan kepada masyarakat.
- 6) Tepat administrasi, yaitu ketetapan prosedur pelaksanaan yang ditetapkan dengan pelaksanaannya.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Adapun lokasi pelaksanaan penelitian adalah di Desa Parangbaddo, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan pertimbangan lebih mudah untuk jangkauan informasi dan pengumpulan data, efisiensi biaya serta dianggap perlu untuk melihat pelaksanaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyaluran Raskin pada daerah ini.

D. Sumber Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang *valid* dan akurat maka penggunaan data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder dan data primer.

- a) Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Sumber dari data sekunder yaitu melalui pengumpulan laporan yang berkaitan dengan program Raskin di Kantor Kecamatan Polongbengkeng Utara, Wiraswasta yang menjadi mitra Bulog untuk mendistribusikan Raskin ke titik distribusi, Kantor Kelurahan Parangbaddo dan juga data yang dimiliki oleh Kepala Desa Parangbaddo.
- b) Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian. Sumber dari data primer yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan langsung dari objek penelitian melalui observasi di lingkungan Kecamatan Polongbengkeng Utara, wawancara terhadap pelaksana dalam hal ini Bapak Camat Polongbengkeng Utara, Bapak Lurah Polongbengkeng Utara, Kepala Desa Parangbaddo dan *Focus Group Discussion* (FGD) pada masyarakat di Desa Parangbaddo.

E. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Objek dalam penelitian ini adalah perilaku dalam kegiatan pelaksanaan indikator-indikator kinerja program Raskin dan sosialisasi internal (pelaksana/pengelola program Raskin), dan sosialisasi eksternal (masyarakat penerima Raskin), serta koordinasi antara instansi terkait dalam implementasi program beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) di Desa Parangbaddo.

Media pengamatan dalam penelitian ini menggunakan panca indra yaitu pengelihatian dan pendengaran. Hasil dari pengamatan dicatat dan selanjutnya dianalisis. Demi kelancaran penelitian, peneliti berusaha agar yang diamati tidak merasa diamati agar tidak mengganggu dalam kegiatan dan menyebabkan perilaku pelaksana terganggu dengan kehadiran peneliti dalam pengamatan

b. Wawancara

Maksud digunakannya metode ini adalah memperoleh keterangan atau data yang diperlukan untuk tujuan penelitian. Data yang akan digali melalui wawancara ini berkaitan dengan pendapat atau pernyataan dari sumber data yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan oleh peneliti. Untuk melakukan wawancara di lapangan peneliti melakukan perjanjian dengan subjek penelitian seperti Aparat/pelaksana yang bertanggung jawab atas program ini selain itu juga peneliti langsung ke titik tempat pendistribusian untuk melakukan wawancara langsung kepada Kepala Desa, kepala rumah

tangga penerima manfaat program Raskin ini, dan panitia pelaksana kegiatan di Desa Parangbaddo. Untuk melakukan wawancara di lapangan peneliti juga mendapat kendala untuk mendapatkan subjek yang akan diwawancarai karena ada dari beberapa kepala rumah tangga yang menerima manfaat menolak untuk diwawancarai, akan tetapi kendala itu tidak menghalangi peneliti mencari data tentang indikator-indikator tepat guna dalam program Raskin ini.

Ada pun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh keterangan atau informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian dari subyek penelitian yaitu Aparat pelaksana/panitia pelaksana kegiatan program Raskin, Kepala Desa dan masyarakat atau kepala rumah tangga miskin yang menerima manfaat program beras miskin ini di Desa Parangbaddo. Dalam teknik ini peneliti mengumpulkan data-data yang berkaitan tentang indikator-indikator kinerja tepat guna dan sosialisasi internal, sosialisasi ekstranet dalam koordinasi pelaksanaan program manfaat beras miskin untuk rumah tangga miskin di Desa Parangbaddo.

Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan petunjuk wawancara, berisi tentang garis pokok-pokok yang akan ditanyakan dengan maksud agar pokok yang direncanakan tersebut tercakup seluruhnya. Dalam pelaksanaan wawancara peneliti menggunakan panduan wawancara (*interview guide*) yang dijadikan pedoman untuk mengontrol jangan sampai proses wawancara kehilangan arah, sehingga pertanyaan yang diajukan selalu terarah pada pokok permasalahan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dari pelaksanaan indikator-indikator kinerja program dalam implementasi program beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) di Desa Parangbaddo.

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah struktur dari pemerintah desa pada bagian umum yang mengelola dan panitia pelaksanaan di setiap titik pendistribusian dan pembagian beras miskin di Desa Parangbaddo Kabupaten Takalar, gambar dan data tentang kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan program Raskin, dan laporan-laporan kegiatan serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah mengemukakan alat yang dipergunakan di dalam menggali data di mana penelitian tersebut dilakukan. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Menurut Marshall dalam Sugiono (2010:310) mengemukakan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Berkaitan dengan observasi yang dilakukan dalam penelitian kualitatif maka observasi yang digunakan yaitu observasi langsung.

2. Wawancara

Menurut Moleong (2007:187) mengemukakan bahwa wawancara dilakukan dengan menggunakan petunjuk wawancara, berisi tentang garis pokok-

pokok yang akan ditanyakan dengan maksud agar pokok yang direncanakan tersebut tercakup seluruhnya.

3. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2010:134) mengemukakan bahwa dokumentasi adalah mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

G. Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Bila jawaban yang di wawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu.

Proses analisis data di mulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi yang sudah di tulis dalam catatan lapangan, dokumen-dokumen pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya. Metode penelitian ini dimaksudkan bahwa data yang di perlukan dalam penelitian ini bersifat kualitatif karena untuk memenuhi apa yang di inginkan oleh penulis pengelolaan data selanjutnya diinterpretasikan dalam bentuk konsep yang dapat mendukung objek pembahasan dengan menarik seluruh kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif, dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan dapat di tandai apabila tidak di perolehnya lagi data atau

informasi baru. Dalam aktivitas analisis data meliputi yaitu data reduksi (*data reduction*), data penyajian (*data display*) serta data penarikan kesimpulan dan verifikasi (*data conclusions:drawing/verifying*). Pengumpulan data juga dilakukan secara terus menerus melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

BAB. IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1) Gambaran Umum Kabupaten Takalar

a. Letak dan Geografis

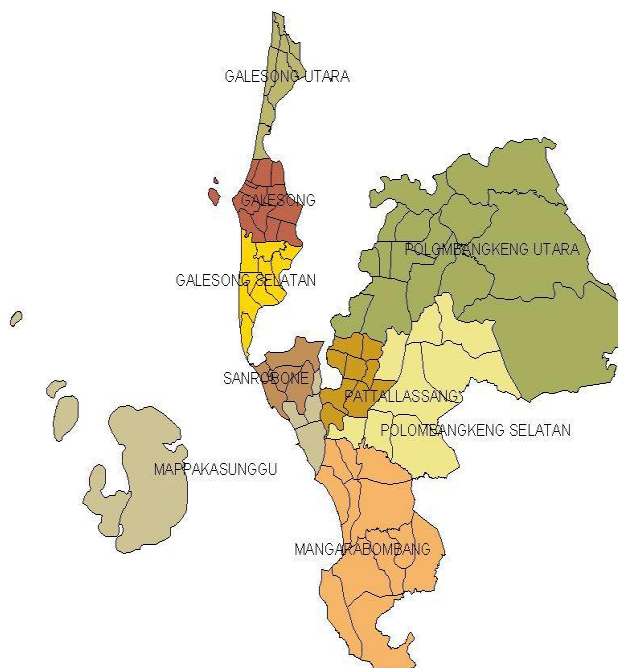
Kabupaten Takalar adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan Indonesia. Ibukotanya terletak di Pattallassang. Kabupaten Takalar terdiri dari Sembilan (9) Kecamatan yaitu : Pattallassang, Polongbangkeng Selatan, Polongbangkeng Utara, Galesong, Galesong Selatan, Galesong Utara, Sanrobone, Mappakasunggu dan Manggarabombang.

Luas Wilayah Kabupaten Takalar tercatat 566,51 km². Jarak ibu kota Kabupaten Takalar dengan ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan mencapai 45 kmyang melalui Kabupaten Gowa.

Kabupaten Takalar merupakan salah satu wilayah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terlatak pada bagian selatan. Letak astronomis Kabupaten Takalar berada pada posisi 5O3' – 5O38' Lintang Selatan dan 119O22' – 119O39' Bujur Timur, dengan luas wilayah kurang lebih 566,51 Km². Secara administrasi Kabupaten Takalar memiliki wilayah berbatasan dengan:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa.
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto.
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Flores.

Gambar 4.1
Peta Wilayah Kabupaten Takalar



Sumber : BPS Kabupaten Takalar dalam Angka 2017

Untuk lebih jelasnya gambaran umum kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Takalar berdasarkan komposisi luas dan jarak dari Pattallassang sebagai Ibukota Kabupaten Takalar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Takalar, Tahun 2016

Kecamatan	Luas (Km²)	Persentase
Mangarabombang	100,50	17,74
Mappakasunggu	45,27	7,99
Sanrobone	29,36	5,18
Polombangkeng selatan	88,07	15,54
Pattallassang	25,31	4,47
Polombangkeng utara	212,25	37,47
Galesong selatan	24,71	4,36
Galesong	25,93	4,58
Galesong utara	15,11	2,67
Takalar	566,51	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Takalar dalam Angka 2017

Tabel di atas terlihat bahwa Kecamatan Polongbangkeng Utara tercatat sebagai kecamatan yang terluas wilayahnya yakni sebanyak 212,25 Km². Sedangkan Kecamatan Galesong Utara tercatat sebagai kecamatan yang terkecil wilayahnya yakni sebanyak 15,11 Km².

b. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Takalar berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 289.978 jiwa yang terdiri atas 139.381 jiwa penduduk laki-laki dan 150.597 jiwa penduduk perempuan. Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016, penduduk Takalar mengalami pertumbuhan sebesar 1,07 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 92,55.

Kepadatan penduduk adalah rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi. Distribusi penduduk adalah pola persebaran penduduk di suatu wilayah, baik berdasarkan batas-batas geografis maupun berdasarkan batas-batas administrasi pemerintahan.

Tabel 4.2
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Takalar, Tahun 2016

Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km²
Mangarabombang	13,33	384
Mappakasunggu	5,52	353
Sanrobone	4,81	475
Polongbangkeng Selatan	9,76	321
Pattallassang	13,24	1.516
Polongbangkeng Utara	17,00	232
Galesong Selatan	8,85	1.038
Galesong	13,96	1.561
Galesong Utara	13,53	2.596
Takalar	100,00	511

Sumber : BPS Kabupaten Takalar dalam Angka 2017

Tabel di atas terlihat Kepadatan penduduk di Kabupaten Takalar tahun 2016 mencapai 511 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 9 Kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Galesong Utara dengan kepadatan sebesar 2.596 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Polongbangkeng Utara sebesar 232 jiwa/Km².

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Takalar, Tahun 2016

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
Mangarabombang	18.498	20.155	38.653	0,92
Mappakasunggu	7.548	8.462	16.010	0,89
Sanrobone	6.574	7.385	13.959	0,89
Polongbangkeng Selatan	13.303	14.984	28.287	0,89
Pattallassang	18.172	20.222	38.394	0,90
Polongbangkeng Utara	23.916	25.372	49.288	0,94
Galesong Selatan	12.205	13.463	25.668	0,91
Galesong	19.955	20.536	40.491	0,97
Galesong Utara	19.210	20.018	39.228	0,96
Takalar	139.381	150.597	289.978	0,93

Sumber : BPS Kabupaten Takalar dalam Angka 2017

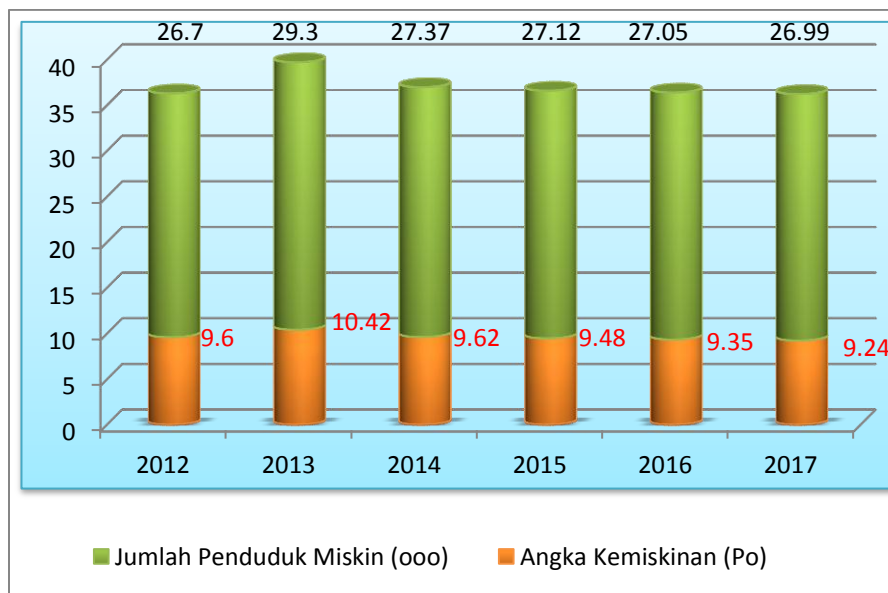
Table di atas terlihat bahwa Kecamatan Polongbangkeng Utara tercatat sebagai kecamatan yang jumlah penduduk laki-laki dan perempuan terbanyak yakni 49.288 orang. Sedangkan Kecamatan

Sanrobone tercatat sebagai kecamatan yang jumlah penduduk laki-laki dan perempuan paling sedikit yakni 13.959 orang.

c. Kemiskinan

Penduduk miskin di Kabupaten Takalar menunjukkan tren menurun sejak tahun 2013-2017. Perkembangan jumlah penduduk miskin dan angka kemiskinan di Kabupaten Takalar mulai tahun 2012 hingga tahun 2017.

Gambar 4.2
Jumlah Penduduk Miskin dan Angka Kemiskinandi Kabupaten Takalar, Tahun 2012-2017



Sumber : BPS Statistik Kabupaten Takalar 2017

Gambar di atas menggambarkan jumlah penduduk miskin Kabupaten Takalar tahun 2017 sekitar 26,99 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin (atau dikenal dengan angka kemiskinan) di Kabupaten Takalar tahun 2017 sebesar 9,24. Angka ini berarti dari 100 penduduk Kabupaten Takalar ada sekitar 9 hingga 10 orang penduduk miskin. Pada periode 2013 hingga 2017 terlihat tren penurunan jumlah dan persentase

penduduk miskin. Secara absolut, penurunan jumlah penduduk miskin tahun 2013-2017 sebesar 2,31 ribu jiwa. Secara relatif juga terjadi penurunan angka kemiskinan sekitar 1,18 poin pada periode 2013-2017.

Jumlah dan persentase penduduk miskin tahun 2013 mengalami peningkatan dibanding tahun 2012, yaitu masing-masing naik 2,6 ribu jiwa dan naik 0,82 poin. Kenaikan harga BBM diduga menjadi salah satu faktor naiknya kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. P1 mengalami fluktuasi pada periode 2012-2017. Indeks kedalaman menurun tahun 2012 hingga 2017. Namun terjadi peningkatan indeks kedalaman kemiskinan dari 1,34 menjadi 1,68 pada periode tahun 2016 ke 2017. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Tabel 4.4
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Takalar, Tahun 2012-2017

Tahun	Indeks kedalaman kemiskinan (P ₁)	Indeks keparahan kemiskinan (P ₂)
2012	1,57	0,48
2013	1,48	0,35
2014	1,20	0,25
2015	1,38	0,34
2016	1,34	0,35
2017	1,68	0,40

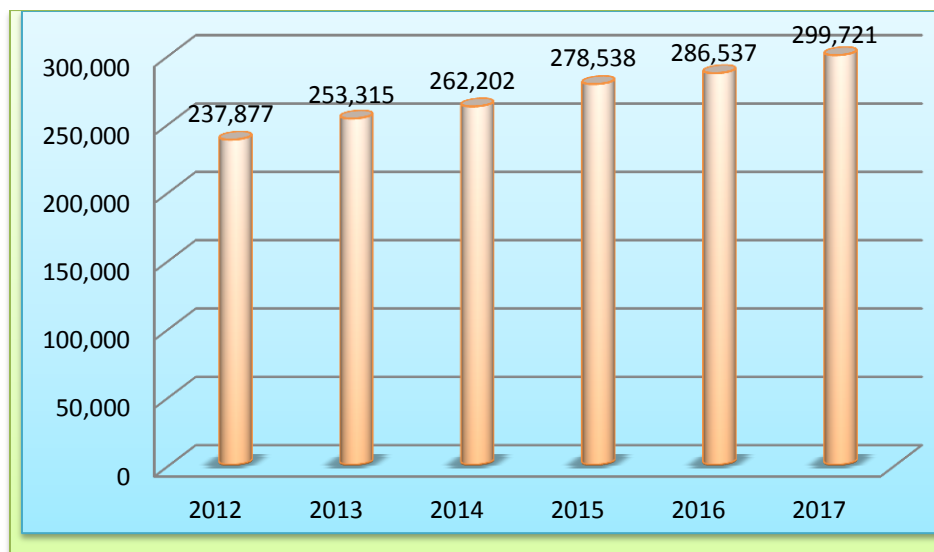
Sumber : BPS Statistik Kabupaten Takalar 2017

Tabel di atas memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks keparahan mengalami penurunan pada periode tahun 2012 ke 2017. Namun sebaliknya sejak tahun 2017 indeks keparahan terus meningkat dari 0,25 menjadi 0,40.

Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Gambaran indeks kedalaman dan indeks keparahan Kabupaten Takalar periode tahun 2012 hingga tahun 2017.

Garis kemiskinan (GK) merupakan batasan pengelompokan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Secara umum Garis Kemiskinan Kabupaten Takalar mengalami peningkatan pada periode tahun 2012-2017. Garis Kemiskinan Kabupaten Takalar tahun 2017 adalah Rp 299.721 per kapita per bulan. Penduduk Kabupaten Takalar tahun 2017 dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Rp 299.721,-. Garis Kemiskinan Kabupaten Takalar tahun 2012-2017.

Gambar 4.3
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln) Kabupaten Takalar
Tahun 2012-2017



Sumber : BPS Statistik Kabupaten Takalar 2017

Gambar di atas menggambarkan Secara umum Garis Kemiskinan Kabupaten Takalar mengalami peningkatan pada periode tahun 2012-2017. Garis Kemiskinan Kabupaten Takalar tahun 2017 adalah Rp 299.721 per kapita per bulan. Penduduk Kabupaten Takalar tahun 2017 dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Rp 299.721,-. Garis Kemiskinan Kabupaten Takalar tahun 2012-2017.

Rumah tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makan dari satu dapur. Yang dimaksud makan dari satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola bersama-sama menjadi satu. Anggota rumahtangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak ada. Rata-rata anggota rumah tangga adalah angka yang menunjukkan rata-rata jumlah anggota rumah tangga per rumah tangga.

Tabel 4.5
Jumlah Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Takalar, Tahun 2014 – 2016

Kecamatan	Rumah Tangga		
	2014	2015	2016
Mangarabombang	8.660	8.697	8.742
Mappakasunggu	3.581	3.618	3.659
Sanrobone	3.053	3.079	3.110
Polongbangkeng Selatan	6.994	7.049	7.111
Pattallassang	8.607	8.744	8.892
Polongbangkeng Utara	11.867	11.984	12.116
Galesong Selatan	5.568	5.622	5.682
Galesong	8.965	9.056	9.157
Galesong Utara	8.362	8.443	8.532

Takalar	65.657	66.292	67.001
----------------	---------------	---------------	---------------

Sumber : BPS Kabupaten Takalar dalam Angka 2017

Tabel di atas terlihat jumlah rumah tangga setiap Kecamatan di Kabupaten Takalar mengalami peningkatan pada periode tahun 2014-2016. Jumlah rumah tangga dalam periode 2014-2016 yang mengalami peningkatan terbanyak yaitu di Kecamatan Polongbangkeng Utara, sedangkan Jumlah rumah tangga dalam periode 2014-2016 yang terendah yaitu di Kecamatan Sanrobone.

2) Gambaran Umum Kecamatan Polongbangkeng Utara

a. Letak dan Geografis

Polongbangkeng Utara sebagai salah satu kecamatan yang terletak disebelahutara dan berjarak kurang lebih 9 kilometer dari ibukota Kabupaten Takalar. Ibukota Kecamatan Polongbangkeng Utara terletak di Kelurahan Palleko yang sebelahutara, Timur dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa, sebelah selatanberbatasan dengan Kecamatan Pattalassang dan Kecamatan PolongbangkengSelatan.

Luas wilayah Kecamatan Polongbangkeng Utara sekitar 212,25 km² atausebesar 37,47 persen dari total Kabupaten Takalar yang memiliki 12 desa dan 4 Kelurahan.

Gambar 4.4
Peta Wilayah Kecamatan Polongbangkeng Utara



Sumber : BPS Kecamatan Polongbangkeng Utara dalam Angka 2017

Tabel 4.6
Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Polongbangkeng Utara, Tahun 2016

Desa/Kelurahan	Luas (Km²)	Persentase
Panrannuangku	7,59	3,58
Mannongkoki	4,28	2,02
Malewang	2,13	1,00
Palleko	2,45	1,15
Mattompodalle	4,08	1,92
Parang Luara	3,07	1,45
Pa'rappunganta	5,25	2,47
Massamaturu	5,63	2,65
Timbuseng	11,57	5,45
Ko'mara	20,29	9,56
Barugaya	72,00	33,92
Towata	16,95	7,99
Kampung Beru	4,80	2,26
Lassang	5,51	2,60
Parangbaddo	4,25	2,00
Lassang Barat	5,20	2,45
Balangtanaya	7,35	3,47
Kale Ko'mara	29,85	14,06
Polongbangkeng Utara	212,25	100,00

Sumber : BPS Kecamatan Polongbangkeng Utara dalam Angka 2017

Tabel di atas terlihat bahwa luas wilayah Desa/Kelurahan yang paling luas di Kecamatan Polongbangkeng Utara yakni Desa/Kelurahan Kale Ko'mara dengan luas 29,85 Km². Sedangkan yang terkecil luas wilayahnya yakni Desa/Kelurahan Malewang dengan luas 2,13 Km².

Tabel 4.7
Jarak dari Desa/Kelurahan ke Ibukota Kecamatan dan Kabupaten di Kecamatan Polongbangkeng Utara (Km), Tahun 2016

Desa/Kelurahan	Jarak ke Ibukota Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten
Panrannuanku	5,0	5,0
Mannongkoki	5,0	6,0
Malewang	1,0	9,0
Palleko	0,3	10,0
Mattompodalle	3,5	13,5
Parang Luara	6,0	16,0
Pa'rappunganta	3,0	13,0
Massamaturu	5,0	15,0
Timbuseng	9,0	19,0
Ko'mara	12,0	22,0
Barugaya	17,0	27,0
Towata	15,0	25,0
Kampung Beru	12,0	22,0
Lassang	11,0	21,0
Parangbaddo	7,0	16,0
Lassang Barat	7,0	17,0
Balanganaya	8,0	16,0
Kale Ko'mara	21,0	31,0
Polongbangkeng Utara		

Sumber : BPS Kecamatan Polongbangkeng Utara dalam Angka 2017

b. Kependudukan

Jumlah penduduk Kecamatan Polongbangkeng Utara pada tahun 2016 sekitar 49.288 jiwa, yang terdiri dari 23.916 laki-laki dan 25.372 jiwa perempuan. Dari jumlah tersebut, Kelurahan Manongkoki adalah yang terbesar jumlah penduduknya sekitar 4.329 jiwa dan desa yang

paling kecil jumlah penduduknya adalah Desa Parangbaddo sekitar 1.351 jiwa.

Tabel 4.8
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut
Desa/Kelurahan di Kecamatan Polongbangkeng Utara, Tahun 2016

Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	
	2010	2015	2016	2010-2016	2015-2016
Panrannuangku	3.830	4.061	4.105	1,61	1,08
Mannongkoki	3.878	4.253	4.329	1,81	1,79
Malewang	3.593	3.824	3.867	1,23	1,12
Palleko	3.238	3.451	3.491	1,26	1,16
Mattompodalle	2.627	2.703	2.714	0,54	0,41
Parang Luara	2.137	2.199	2.209	0,55	0,45
Pa'rappunganta	2.460	2.532	2.542	0,55	0,39
Massamaturu	1.584	1.703	1.727	1,45	1,41
Timbuseng	2.668	2.827	2.856	1,14	1,02
Ko'mara	2.019	2.138	2.160	1,13	1,03
Barugaya	3.162	3.387	3.430	1,36	1,27
Towata	2.790	2.957	2.987	1,14	1,01
Kampung Beru	2.449	2.551	2.567	0,78	0,63
Lassang	1.739	1.967	1.892	1,41	1,34
Parangbaddo	1.289	1.341	1.351	0,78	0,74
Lassang Barat	2.866	3.077	3.119	1,41	1,36
Balangtanaya	1.927	2.072	2.100	1,44	1,35
Kale Ko'mara	1.720	1.823	1.842	1,15	1,04
Polombangkeng Utara	45.976	48.766	49.288	1,17	1,07

Sumber : BPS Kecamatan Polongbangkeng Utara dalam Angka 2017

Tabel di atas terlihat Desa/Kelurahan Mannongkoki tercatat sebagai Desa/Kelurahan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya yakni sebanyak 4.329 jiwa. Sedangkan Desa/Kelurahan Parangbaddo yang paling rendah jumlah penduduknya yakni sebanyak 1.351 jiwa dari sekecamatan Polongbangkeng Utara.

Kepadatan penduduk Kecamatan Polongbangkeng Utara dalam kurun waktu 2015 hingga 2016, nampak mengalami kenaikan, dari 229 jiwa/km² tahun 2015 menjadi 232 jiwa/km² tahun 2016. Jika dilihat perdesa, tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada di Kelurahan Malewang, yakni sekitar 1.815 jiwa/km², diikuti Kelurahan Palleko sekitar 1424 jiwa/km². Sedangkan desa dengan tingkat kepadatan terendah adalah Desa Barugaya yakni sekitar 48 jiwa/km².

Tabel 4.9
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Polongbangkeng Utara, Tahun 2016

Desa/Kelurahan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km²
Panrannuangku	8,3	540
Mannongkoki	8,8	1.011
Malewang	7,8	1.815
Palleko	7,1	1.424
Mattompodalle	5,5	665
Parang Luara	4,5	720
Pa'rappunganta	5,2	484
Massamaturu	3,5	307
Timbuseng	5,8	247
Ko'mara	4,4	106
Barugaya	7,0	48
Towata	6,1	176
Kampung Beru	5,2	534
Lassang	3,8	343
Parangbaddo	2,7	318
Lassang Barat	6,3	600
Balangtanaya	4,3	286
Kale Ko'mara	3,7	61
Polombangkeng Utara	100	232

Sumber : BPS Kecamatan Polongbangkeng Utara dalam Angka 2017

Tabel di atas terlihat bahwa Kelurahan Malewang tercatat sebagai Kelurahan terpadat penduduk yakni sebanyak 1815 orang/km². Sedangkan Kelurahan Barugaya tercatat sebagai Kelurahan yang terkecil Kepadatan penduduk yakni sebanyak 48 orang/km².

Penduduk usia produktif yakni kelompok umur 15-64 tahun di Kecamatan Polongbangkeng Utara mengalami peningkatan dari 15.152 di tahun 2015 menjadi 32.737 di tahun 2016. Sedangkan usia tidak produktif yakni kelompok 0-14 tahun menjadi 10.833 dan 65+ tahun menjadi 2.396 dari 13.205 di tahun 2014 menjadi 13.229 di tahun 2015.

Tabel 4.10
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Polongbangkeng Utara, Tahun 2016

Kelompok Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	2.268	2.197	4.465
5 – 9	2.249	2.152	4.401
10 – 14	2.281	1.983	4.264
15 – 19	2.216	2.099	4.315
20 – 24	1.906	1.961	3.867
25 – 29	1.734	1.957	3.691
30 – 34	1.879	2.125	4.004
35 – 39	1.758	1.918	3.676
40 – 44	1.610	1.905	3.515
45 – 49	1.562	1.692	3.254
50 – 54	1.432	1.539	2.971
55 – 59	960	971	1.931
60 – 64	691	822	1.513
65+	1.370	2.051	3.421
Jumlah	23.916	25.372	49.288

Sumber : BPS Kecamatan Polongbangkeng Utara dalam Angka 2017

Tabel di atas terlihat bahwa di Kecamatan Polongbangkeng Utara ada sebanyak 49.288 jiwa penduduk. Penduduk dengan jumlah terbanyak yakni 4.315 jiwa penduduk yang berumur 15 tahun ke atas

pada tahun 2016, yang terdiri dari 2.216 laki-laki dan 2.099 perempuan. Sedangkan jumlah penduduk yang terendah yakni berumur 60 tahun ke atas sebanyak 1.513 jiwa penduduk yang terdiri dari 691 laki-laki dan 822 perempuan.

3) Gambaran Umum Desa Parangbaddo

a. Letak dan Geografis

Desa/Kelurahan Parangbaddo adalah Desa yang berada di Kecamatan Polongbengkeng Utara Kabupaten Takalar, serta berdekatan dengan Kabupaten Gowa. Adapun luas wilayah Desa/Kelurahan adalah 4,25 Km dan mempunyai 4 Dusun (Parang baddo, Panaikang, Parang Bianara dan Batu Eja). Adapun batas-batas wilayah Desa/Kelurahan Parangbaddo sebagai berikut:

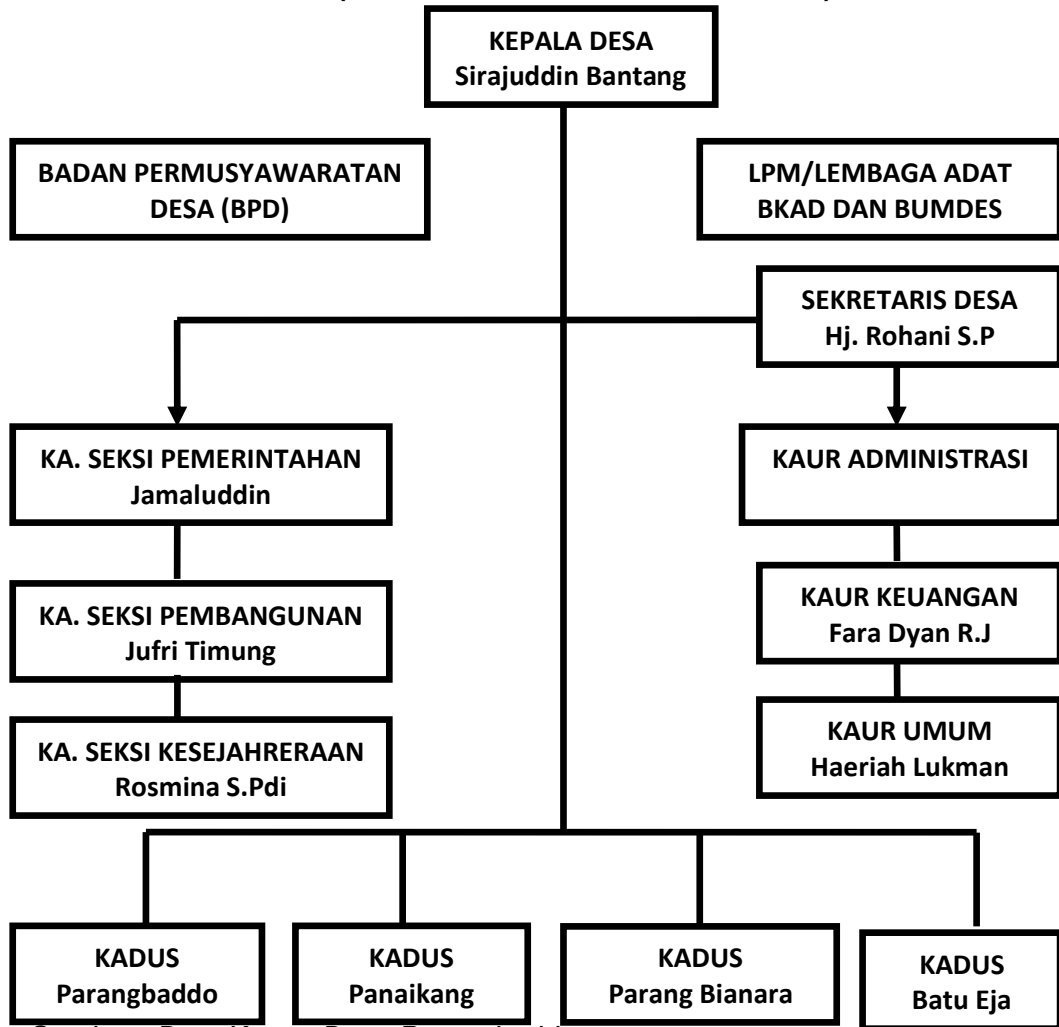
- 1) Sebelah Utara : Perbatasan dengan Kelurahan Kampung Beru.
- 2) Sebelah Timur : Perbatasan dengan Kelurahan Barugaya.
- 3) Sebelah Selatan : Perbatasan dengan Desa Parappunganta.
- 4) Sebelah Barat : Perbatasan dengan Kelurahan Parangluara.

b. Jumlah Penduduk

Pada sensus penduduk tahun 2017, jumlah penduduk di Desa/Kelurahan Parangbaddo Kecamatan Polongbengkeng Utara Kabupaten Takalar adalah 1.443 jiwa, terdiri dari laki-laki 707 jiwa dan perempuan 736 jiwa. Adapun jumlah Kepala Keluarga di Desa/Kelurahan Parangbaddo adalah sebanyak 458 KK dan jumlah rumah di Desa/Kelurahan Parangbaddo adalah 357 rumah.

c. Struktur Pemerintahan

Gambar 4.5
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Parangbaddo
Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar
(Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014)



Sumber : Data Kantor Desa Parangbaddo

Penjelasan pada tabel di atas bahwa sebagai struktur pemerintahan yang ada di Desa/Kelurahan Parangbaddo, serta memiliki sub bagian pelaksanaantugas seperti Sektretaris dan beberapa bagian Kasi (Kepala Seksi) diantaranya :Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan dan Kasi Kesejahteraan. Dimana ketigaKasi pemerintahan ini berperan sebagaimana fungsinya yang diamanatkan oleh kepala Desa/Kelurahan Parangbaddo. Terdapat pula 4 Kadus (Kepala Dusun) yang berperan

sebagaimana fungsinya yang diamanatkan oleh kepala Desa/Kelurahan Parangbaddo.

B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)

1. Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Desa/Kelurahan Parangbaddo

Keberhasilan program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu Raskin bertujuan untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.

Dari program penanggulangan kemiskinan yang berada pada kluster I, yaitu kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu. Raskin mempunyai multi fungsi, yaitu memperkuat ketahanan pangan keluarga miskin, sebagai pendukung bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pendukung usaha tani padi dan sektor lainnya dan peningkatan pemberdayaan ekonomi Daerah. Disamping itu, Raskin berdampak langsung pada stabilisasi harga beras, yang akhirnya juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Dalam hal ini program beras untuk rakyat miskin dilaksanakan secara bertahap atau melalui jalur administrasi kewilayahan yang ada di Indonesia yaitu melalui dari pusat dengan adanya Kemenko Kesra RI 2012 tentang

pedoman umum penyaluran Raskin, melalui Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Takalar, Kecamatan Polongbangkeng Utara, kemudian Desa/Kelurahan Parangbaddo hingga akhirnya dapat disalurkan langsung kepada masyarakat. Adapun proses penyaluran beras untuk masyarakat miskin dapat dilihat pada tabel IV.7

Tabel 4.11
Tahapan Proses Penyaluran Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin)

Tahap	Wilayah	Pelaku/penanggung jawab
Tahap I	Pusat	Pusat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Menteri Koordinator di bidang Kesejahteraan Rakyat.
Tahap II	Provinsi	Provinsi Tim Koordinasi Raskin Provinsi, Gubernur.
Tahap III	Kabupaten	Kabupaten Tim Koordinasi Raskin Kabupaten, Bupati.
Tahap IV	Kecamatan	Kecamatan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, Bupati/Walikota.
Tahap V	Kelurahan	Kelurahan Tim Koordinasi Raskin Kelurahan, Kepala Desa atau Lurah atau kepala pemerintah setingkat.
Masyarakat Penerima Raskin		

Sumber : Data Kemenko Kesra RI 2014 Pedoman Raskin.

Pemerintah yang menangani kebijakan ini, seperti lurah mempunyai beberapa cara untuk memaksimalkan program Raskin ini. Diantaranya:

a. Tepat Sasaran

Beras Raskin hanya diberikan kepada keluarga sasaran yang terdaftar dalam penerima Raskin. Pemberian atau pembelian beras miskin (Raskin) hanya diberikan kepada keluarga yang tidak mampu. Berdasarkan hasil studi lapangan bahwa beras miskin (Raskin) dibagikan berdasarkan hasil database dari Kabupaten dan berdasarkan

hasil musyawarah Desa/Kelurahan untuk menentukan siapa yang berhak untuk menerima raskin.

Hasil wawancara dengan Sirajuddin Bantang mengatakan bahwa:

“Pemberian atau pembelian beras miskin (Raskin) sebenarnya hanya diberikan kepada keluarga yang tidak mampu, dengan mengumpulkan kartu keluarga untuk dipilih siapa yang layak mendapatkan Raskin atau tidak disetiap lingkungan/desa. Mengenai tepat sasaran, iya. Kami sudah mendata siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan Raskin, namun di kembalikan lagi ke pemerintah pusat karena dialah yang menentukan dalam pembagian jatah Raskin. Jadi kami hanya di tugaskan untuk membagikan jatah Raskin yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat.”

Penjelasan di atas dari wawancara oleh kepala Desa Parangbaddo yaitu pemberian atau penerima Raskin dilakukan pendataan oleh kepala dusun dengan sistem pengumpulan kartu keluarga dengan menilai dari faktor ekonomi keluarganya sehingga diberikan Raskin, karena dengan transparansinya Pemerintah dalam melakukan pendataan bagi masyarakat yang menerima beras miskin dengan melihat dari berbagai macam faktor sehingga benar-benar siapa yang diberikan beras Raskin kepada masyarakat, tapi masih saja ada yang belum dapat Raskin sesuai data yang telah di kumpulkan.

Pendapat dari Dg. Sawa selaku warga penerima manfaat Raskin mengenai tepat sasaran mengatakan bahwa:

“menurut saya pembagian beras Raskin belum tepat sasaran pada masyarakat yang kurang mampu. Saya dengar-dengar ada masyarakat yang berpenghasilan cukup tapi mendapat Raskin. Saya juga heran kenapa data yang di berikan oleh pemerintah Desa tidak sesuai dengan data yang telah di berikan.”

Hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya sebagian warga paham siapa tepat sasaran Raskin akan tetapi karena kondisi masyarakat, maka para pelaksana berdasarkan kesepakatan

warga dan pemerintah Desa mengambil kebijakan untuk membagi rata saja jatah Raskin pada semua warga. Persoalan akan muncul apabila terjadi penambahan jumlah penduduk miskin di suatu wilayah.

Hasil wawancara dengan Kurnia Dg. Intang berpendapat dalam mencapai keberhasilan tepat sasaran:

“Pada tahap tepat sasaran saya rasaperlu diperbaharui oleh di pemerintah pusat, karna yang menerima Raskin masih ada yang menerima dalam keadaan ekonominya masih mencukupi atau bisa dikatakan mampu dan masih ada pula yang benar-benar layak mendapatkan Raskin namun tidak mendapatkan Raskin. Karna percuma juga kami mengumpulkan data-data tiap tahun namun data yang di gunakan untuk penyaluran Raskin masih menggunakan data tahun-tahun yang lalu”.

Dalam hal ini pemerintah pusat harus lebih ekstra dalam menjalankan kebijakan sehingga bisa berjalan dengan baik, Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich yang dikutip oleh Abdul Wahab bahwa: “Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.”

b. Tepat Jumlah

Keberhasilan program juga ditentukan oleh ketepatan jumlah beras yang didistribusikan ketitik sasaran. Jumlah beras yang ditetapkan dalam pedoman umum Raskin (pedum) 2016 sebanyak 15 kg /bulan selama 12 bulan. Berdasarkan dengan data jumlah keluarga penerima Raskin yaitu 1 kepala keluarga mendapatkan beras miskin (Raskin) sebesar 15

kg/RTS/bulan. Sehingga 1 kepala keluarga di dalam 1 tahun (12 bulan) masyarakat memperoleh beras sebanyak 180 kg.

Hasil wawancara dengan Kurnia Dg. Intang berpendapat berbeda dengan hal di atas yang mengatakan bahwa:

“Dalam penyaluran Raskin pada tahun lalu yang di lakukan dalam tiap bulannya dalam 1 kepala keluarga penerima Raskin hanya mendapatkan setengah dari jumlah yg di tetapkan dalam pedoman Raskin 2016 yang 15 kg/bulan. Jadi jumlah beras yang di dapatkan oleh keluarga penerima Raskin yaitu 14 liter (kurang lebih 7 Kg/bulan).”

Penjelasan diatas dari wawancara oleh Ibu Kepala Lingkungan Desa/Kelurahan Parangbaddo pemberian Raskin yang diberikan kepada masyarakat RTS sebanyak 7 kg/1 kepala keluarga bagi penerima RTS. Sehingga masyarakat tidak bisa menerima lebih banyak atau kurang dalam pembagian Raskin, karna dihitung berapa penerima RTS dengan jumlah beras yang didistribusikan dari Kecamatan.

Hasil wawancara dengan Dg. Bani mengatakan bahwa:

“Jumlah Raskin yang diberikan kepada masyarakat berbeda dengan ketentuan pemerintah yaitu 7 kg/RTS atau setengah dari ketentuan pemerintah yang 15 kg, yang diberikan kepada penerima Beras Miskin yang ada di Desa/Kelurahan Parangbaddo.”

Hasil wawancara dengan Dg. Bau mengatakan bahwa:

“Jumlah beras yang diberikan kepada kami itu hanya 14 liter atau 7 kg, yang diberikan kepada Kepala Lingkungan dalam setiap pendistribusian atau pembagian kepada masyarakat penerima Beras Miskin.”

Dalam mengukur keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang dibuat harus dilihat dari penerapannya kemasyarakat, menurut William N. dunn implementasi kebijakan akan dilaksanakan sesuai dengan *policy statement*. Karna suatu kebijakan publik akan

langsung dinilai pada konteks penerapannya. Keberhasilan suatu kebijakan tidak dapat dinilai hanya dari *policy statement* saja, akan tetapi keberhasilannya dinilai setelah *policy statement* tersebut di implementasikan. Meskipun suatu *policy statement* sangat ideal, akan tetapi dapat saja gagal mencapai tujuannya karena kesalahan dalam implementasi.

c. Tepat Harga

Dalam pelaksanaannya sering terjadi harga beli beras oleh penerima disetiap daerah bervariasi umumnya lebih dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga harga juga dipengaruhi oleh kebijakan dalam memutuskan harga yang sebagian besar ditentukan oleh pelaksana lokal yaitu Kepala Desa. Harga tebusberas miskin (Raskin) yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu Rp 1.600/kg dititik distribusi.

Hasil wawancara dengan Dg. Bani hal di atas dibenarkan mengatakan bahwa:

“Harga jual beras yang diberikan kepada masyarakat RTS yang ada di Desa/Kelurahan Parangbaddo itu sama dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan harga Rp 27 ribu (14 liter/7 kg).”

Hasil wawancara dengan Kurnia Dg. Intang mengatakan bahwa:

“Harga yang diberikan kepada masyarakat penerima Raskin yaitu Rp 27 ribu per 7 Kg dalam setiap pendistribusian kepada masyarakat penerima Raskin.”

Hasil wawancara dengan Dg. Saha mengatakan bahwa:

“Harga beras yang diberikan kepada kami itu Rp 27 ribu/14 liter/7 kg yang diberikan kepada kami dalam setiap mengambil beras.”

Penjelasan diatas dari wawancara oleh Kepala Lingkungan Desa/Kelurahan Parangbaddo bahwa harga yang diberikan kepada masyarakat RTS itu sama harga jualnya yang di tetapkan oleh pemerintah.

d. Tepat Waktu

Waktu pelaksanaan penyaluran Beras Miskin (Raskin) kepada RTS-PM sesuai dengan rencana penyaluran yaitu mekanisme pelaksanaan penyaluran yang seharusnya 1 kali dalam 1 bulan. Berdasarkan dalam waktu pelaksanaan beras miskin (Raskin) tahun 2017 di Desa/Kelurahan Parangbaddoyang berlangsung tiap bulannya, sesuai dengan prosedur yang di tetapkan oleh Pemerintah yaitu 1 kali (per 1 bulan).

Hasil wawancara dengan Kurnia Dg. Intang mengatakan bahwa:

“Dalam waktu pelaksanaan pembagian Raskin yang ada di Desa/Kelurahan Parangbaddomemang tidak pasti pelaksanaannya, karena pendistribusian dari Kecamatan kami tunggu sampai terkirim sehingga tidak menentu pembagian di setiap Desa.”

Penjelasan diatas dari wawancara oleh Ibu kepala lingkungan Desa/Kelurahan Parangbaddo bahwa dalam waktu pelaksanaan pembagian Raskin yang ada di Desa/Kelurahan Parangbaddo kami akui tak menentu karna menunggu pengiriman dari Kecamatan. Sehingga pembagian yang dilakukan kepada masyarakat juga ikut menunggu serta tidak adanya kepastian dari Kecamatan kapan adanya penyaluran beras kesetiap Desa.Dengan ketidakpastiannya pengiriman beras kepada masyarakat penerima RTS jadi waktu pembagian juga harus menunggu hingga waktu yang tidak bisa dipastikan.

Hasil wawancara dengan Dg. Bani mengatakan bahwa:

“Dalam pembagian Raskin yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu memang tak menentu akibatnya waktu pendistribusiannya pun tidak menentu kapan bisa diberikan kepada masyarakat penerima Raskin.”

Sama halnya yang di katakan oleh warga Tayu mengatakan bahwa:

“Saya disini berpenghasilan rendah, suami saya bekerja sebagai tukang ojek yang penghasilannya tidak menentu. Saya harap bisa mendapatkan Raskin secara teratur dan kualitas berasnya baguslah, karena ada kalanya pembagian berasnya tidak menentu dan kualitasnya agak jelek.”

Penjelasan yang di atas dalam wawancara dengan Tayu bahwa pemerintah harus lebih serius dalam penanganan pengiriman beras kepada masyarakat sehingga adanya kepastian. Karna yang diberikan kepada masyarakat penerima RTS hanya 14 liter/7 Kg dan akan habis dalam waktu beberapa hari/minggu, sedangkan pengiriman beras yang dilakukan oleh pemerintah sangat tidak konsisten dalam penyalurannya.

e. Tepat Kualitas

Kualitas beras adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku. Tetapi, dalam pelaksanaannya penerima manfaat beras miskin (Raskin) sebagian masyarakat ada yang mendapatkan kualitas beras yang agak rendah. Namun, kualitas beras yang diterima oleh masyarakat di tahun 2017 dari awal pembagian beras sampai akhir di Desa/Kelurahan Parangbaddo pembagian beras yang diterima oleh masyarakat sama maksudnya dengan beras yang agak bagus dan masih layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Hasil wawancara dengan Kurnia Dg. Intang mengatakan bahwa:

“Kualitas beras memang tidak selamanya bagus ada kalanya berasnya agak bagus dan ada pula berasnya tercampur dengan beras yang kualitasnya bagus dengan beras yang kualitasnya kurang bagus tapi setidaknya masih layaklah untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Karna apa yang dikirimkan pemerintah pusat kepada kami itu juga kami bagikan kepada masyarakat.”

Penjelasan diatas dari wawancara Ibu kepala lingkungan di Desa/Kelurahan Parangbaddo dalam pendistribusian kualitas beras memang tidak seperti yang diharapkan masyarakat penerima RTS dengan kualitas beras yang bagus.Karna lamanya pengiriman beras dan terlalu lama tersimpan digudang sehingga itu menjadi penyebab jelek kualitas berasnya.

Hasil wawancara dengan Dg. Sitti mengatakan bahwa:

“Kualitas berasnya memang terkadang tidak bagus tapi mau bagaimana lagi hanya itu yang diberikan pemerintah setempat kepada kita jadi harus di terima saja. Namun ada kalanya juga beras yang kami dapat itu kualitasnya bagus.”

Pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangannegara harus berperan aktif dalam melaksanakan kebijakan dan mengevaluasi keluhan masyarakat untuk mensejahterahkan masyarakatnya.Plato juga mengajarkan bahwa tujuan, tugas dan fungsi negara ialah untuk kesenangan, kebahagiaan, kesejahteraan manusia yang menjadi warganya.Lebih jelas lagi terlihat bahwa negara semata-mata hanyalah alat bagi manusia untuk mencapai kesenangan, kebahagiaan dan kesejahteraan hidup.

f. Tepat Administrasi

Proses pembayaran Beras Miskin (Raskin) dalam pedoman umum (pedum) raskin 2016 pembayaran HPB (Harga Penjualan Beras) Raskin dari RTS-PM kepada pelaksana distribusi Raskin dilakukan secara tunai sebesar Rp 1.600/kg.

Hasil wawancara dengan Kurnia Dg. Intang mengatakan bahwa:

“Dalam pembayaran Raskin, masyarakat penerima Raskin harus membayar langsung atau tunai ditempat pengambilan Raskin dan mengambil langsung beras sehingga mempermudah administrasi untuk masyarakat yang didistribusikan oleh pemerintah.”

Penjelasan diatas dari wawancara oleh Ibu Kepala lingkungan Desa/Kelurahan Parangbaddo bahwa jika masyarakat penerima Raskin jika ingin melakukan pembayaran beras hanya bila ingin mengambil jatah yang sudah ditentukan oleh pemerintah setempat. Dengan harga yang sudah ditentukan oleh Ibu Kepala Dusun dengan jumlah beras yang diambil dari Desa dan juga mempermudah proses pelaksanaannya tanpa adanya perantara dari pihak kedua dalam pembayaran ketika ingin membeli atau mengambil jatah yang sudah didata masyarakat penerima Raskin oleh pemerintah setempat, dengan mudahnya pembayaran saat mengambil beras.

Hasil wawancara dengan Sari Dg. Sunggu mengatakan bahwa:

“Pada saat kami mau mengambil jatah beras yang diberikan kepala lingkungan kami harus membayar tunai ditempat dengan harga yang ditentukan oleh kepala lingkungan dan setelah itu didata siapa-siapa saja yang sudah mengambil jatah berasnya.”

Jumlah penerima Raskin di Desa/Kelurahan Parangbaddo semakin tahun semakin meningkat, ini dikarenakan adanya penambahan jumlah penduduk dari tahun ketahun, baik itu berupa penambahan keluarga yang

menikah, masyarakat yang pendatang dari luar masuk ke Desa/Kelurahan Parangbaddo dan angka kelahiran. Pada tahun 2017, jumlah penerima Raskin di Desa/Kelurahan Parangbaddo mencapai 55 kepala keluarga dari berbagai bidang pekerjaan yang berpenghasilan rendah. 55 keluarga ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.12
Daftar Nama-Nama Kepala Keluarga yang menerima Raskin di
Desa/Kelurahan Parangbaddo Tahun 2017

No.	Kepala Rumah Tangga		No.	Kepala Rumah Tangga	
	Nama	Jenis Kelamin		Nama	Jenis Kelamin
1	Arifin Dg Rewa	L	29	Dg Rasyid	L
2	Dg Japa	L	30	Sija	L
3	Saharuddin Dg Lili	L	31	Ma'do Dg Bella	L
4	Dg Sunung	L	32	Tajuddin Dg Rate	L
5	Neteng Dg Ngerang	L	33	Abdul Rahman	L
6	Pakaruddi Dg Manye	L	34	Lurang Dg Jarung	L
7	Tajam Dg Nai	L	35	Ahmad Basir	L
8	Dg Nassa	L	36	Dg Suddin	L
9	Junaedi Dg Lalla	L	37	Hatang Dg Ngero	L
10	Dg Bombang	L	38	Jamaluddin	L
11	Saparuddin	L	39	Maka Dg Serang	L
12	Dg Sawa	P	40	Yaha	L
13	Muh. Sain	L	41	Suddin Dg Ngalle	L
14	Manai Tompo	L	42	Bau	P
15	Naharuddin Dg Sore	L	43	Ardiansyah Dg Tutu	L
16	Syamsuddin Dg Ngitung	L	44	Saharuddin Dg Muntu	L
17	Baco Dg Ngalli	L	45	Jiko Dg Buang	L
18	Gassing D	L	46	Talla Dg Nai	L
19	Yahya Dg Lewa	L	47	Dg Paja	L
20	Dg Sengge	L	48	Sumarlin	L
21	Amiruddin Dg Tayang	L	49	Muh. Bakri	L
22	Dg Bani	L	50	Dg Gassing	L
23	Esa	L	51	Dg Lebu	L
24	Dg Saha	P	52	Dg Ganna	L
25	Papi Dg Sialle	L	53	Lurang	L

26	Basse Dg Nonang	P	54	Mansuriah	P
27	Sari Dg Sunggu	P	55	Dg Sitti	P
28	Tayu	P			

Sumber : Data Kantor Desa Parangbaddo

Tabel diatas menunjukkan pada Tahun 2017, jumlah penduduk yang masuk kriteria penerima Raskin mencapai 55KK yang terdiri dari berbagai kalangan pekerjaan yang berpenghasilan rendah yang ada di Desa/Kelurahan Parangbaddo Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam Program Beras Miskin (Raskin) di Desa/Kelurahan Parangbaddo

Hasil penelitian mengenai program Raskin membuktikan bahwa terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya.

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam implememtasi program Raskin di Desa/Kelurahan Parangbaddo adalah adanya instrumen atau peraturan tentang implementasi yang jelas tertulis didalam pedoman umum Raskin tahun 2014 serta kesediaan petugas dalam melaksanakan Raskin, kesediaan warga dalam menerima Raskin meskipun terkadang kualitas beras buruk dan ketepatan waktu para RTS dalam membayar Raskin sehingga penyaluran berjalan lancar tanpa ada tunggakan.

Hasil wawancara dengan Sirajuddin Bantang mengatakan bahwa:

“Perlu adanya terlebih dahulu berita acara agar dapat diketahui bahwa siapa saja yang berhak atau layak untuk di berikan Raskin. Setelah itu berita acara tersebut di tanda tangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan agar tidak ada lagi kekeliruan dalam pendistribusian Raskin.

Penjelasan di atas dari wawancara oleh Kepala Desa Parangbaddo bahwa dalam penetapan masyarakat yang mendapatkan Raskin tidak begitu saja langsung di berikan Raskin yang menurut kita berhak untuk dapat, tapi perlu adanya terlebih dahulu data-data dari kepala keluarga di setiap lingkungan.

Pendapat berbeda dari hasil wawancara Kurnia Dg. Intang Ibu kepala lingkungan mengatakan bahwa:

“Adanya sosialisasi dari kepala lingkungan yang memberitahukan kepada masyarakat yang ada di lingkungannya bahwa adanya informasi mengenai Raskin yang akan di salurkan.”

Dalam menjalankan suatu kebijakan haruslah pemerintah terlebih melakukan sosialisasi sehingga bisa berjalan dengan baik serta evaluasi apa yang menjadi permasalahan dari kebijakan tersebut. Menurut Edward haruslah ada Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar pemerintah mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Faktor pendukung yang peneliti dapatkan dari informan yang Ma'do Dg. Bella yang berprofesi sebagai petani. hasil wawancara dapat disimpulkan faktor pendukung yang dihadapi dalam pelaksanaan program Raskin diantaranya adalah:

“Besarnya partisipasi masyarakat di Desa/Kelurahan Parangbaddo dan aparat kelurahan dalam mensosialisasikan program Raskin baik melalui berbagai pertemuan sosial dan penyebaran melalui mulut ke mulut.”

Peneliti dapatkan dari informan yang Dg. Bani, tokoh masyarakat di Desa/Kelurahan Parangbaddo, hasil wawancara dapat disimpulkan faktor pendukung yang dihadapi dalam pelaksanaan program Raskin adalah :

“Adanya usulan dari RT dan kepala lingkungan untuk keluarga yang tidak mampu dari segi pendapatan dan ekonomi agar keluarga yang tidak mampu benar-benar mendapatkan jatah Raskin.”

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam implementasi/pelaksanaan Program Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin) mulai dari tahap Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan sampai pada saat sampai di tangan Rumah Tangga Miskin Sasaran Raskin tentu saja mengalami banyak masalah, dan oleh karena itu melalui penelitian ini peneliti menemukan beberapa pokok permasalahan yang dalam pelaksanaan distribusi beras Raskin tersebut adapun masalah-masalah yang muncul pada pelaksanaan program beras untuk rakyat miskin (Raskin) yang ada di Desa/Kelurahan Parangbaddo adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Kurnia Dg. Intang mengatakan bahwa :

“Adakalanya masyarakat yang mendapatkan Raskin, lama baru dia ambil jatahnya karena terhambat oleh biaya dan terkadang ada juga masyarakat yang dapat jatah tidak muncul-muncul karena disebabkan oleh sesuatu hal, individual lah faktor penghambatnya.”

Hasil wawancara dengan Dg. Bani mengenai penetapan daftar nama-nama rumah tangga miskin sasaran Raskin yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya mengatakan bahwa :

“Dalam pendataan ternyata kesalahan sasaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang masih menggunakan data-data lama meskipun kami tiap tahunnya mengirim data-data baru. Hal ini terindikasi dari adanya rumah tangga tidak miskin yang menjadi penerima Raskin dan

adanya rumah tangga miskin yang belum menjadi penerima Raskin. Itulah salah satu faktor yang diperkirakan melatar belakangi kesalahan sasaran”.

Hal ini tidak sejalan dengan kebijakan yang diharapkan masyarakat sehingga pemerintah harus lebih mengedepankan keluhan masyarakat sehingga kebijakan bisa dapat berjalan dengan baik. Menurut *Edward*, kepala pemerintah harus memiliki Sumber daya manusia bagus, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya financial.

Hasil wawancara dengan Sirajuddin Bantang mengatakan bahwa :

“Koordinasi memang sangat dibutuhkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan hal tersebut di upayakan agar terdapat pembagian kerja yang jelas sehingga tidak terjadi timpang tindih fungsi dan tugas di bidang masing-masing, dan Secara umum koordinasi dan komunikasi pelaksanaan Raskin dinilai lemah”.

Pengawasan dalam hal ini mengacu pada pelaksanaan monitorin oleh pihak otoritas yang memiliki wewenang dalam proses penyaluran beras untuk rakyat miskin tersebut, yaitu Kabupaten kepada kecamatan hingga pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan terhadap pelaksanaan distribusi Raskin oleh pihak Desa/Kelurahan kepada masyarakat.

3. Proses Pendistribusian Beras Bersubsidi Untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin)

Titik distribusi adalah tempat yang dapat dijangkau keluarga sasaran penerima manfaat. Pelaksana distribusi adalah Aparat Desa/Kelurahan yang dibantu oleh warga masyarakat setempat dan ditunjukkan oleh kepala Desa/Kelurahan.

Penentuan keluarga sasaran penerima manfaat adalah berdasarkan surat keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan pagu Raskin dan jumlah keluarga sasaran penerima manfaat melalui musyawarah Desa/Kelurahan menggunakan data dasar keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera. Musyawarah Desa/Kelurahan untuk memilih keluarga sasaran penerima manfaat melibatkan Aparat Desa/Kelurahan, (termasuk kepala Dusun/Lingkungan, RW, RT), anggota Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan, Institusi Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, tokoh masyarakat dan perwakilan keluarga miskin. Keluarga sasaran penerima manfaat yang dipilih dalam musyawarah Desa/Kelurahan yang dilampiri daftar keluarga sasaran penerima manfaat (format Model DPM-1) dan ditandatangani kepala Desa/Lurah serta disahkan oleh Camat setempat.

Hasil wawancara dengan Sirajuddin Bantang mengatakan bahwa :

“Awal dalam pendistribusian Raskin itu bermula dari pemerintah pusat (Bupati) yang bekerja sama dengan Bulog yang ada di Takalar Lalu di kirim ke setiap Kecamatan yang ada di Takalar, dan dari kecamatan lah Raskin kemudian di salurkan ke masing-masing Desa/Kelurahan termasuk di Desa/Kelurahan Parangbaddo”.

Hasil wawancara dengan Kurnia Dg. Intang mengatakan bahwa :

“Prosesnya itu bermula dari pemerintah pusat (Bupati) lalu di kirim ke kantor Kecamatan Polombangkeng Utara, kemudian di kirim ke kantor Desa

Parangbaddo lalu di bagikan lah Raskin tersebut kepada rumah tangga sasaran (RTS)".

Penjelasan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Dan Ibu Kepala Lingkungan dalam proses pendistribusian Raskin adalah adanya alur secara bertahap atau melalui jalur administrasi kewilayahan yang ada di Kabupaten Takalar yaitumelalui Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Takalar, Kecamatan Polongbangkeng Utara, kemudian Desa/Kelurahan Parangbaddo hingga akhirnya dapat disalurkan langsung kepada masyarakat.

C. Analisis dan Interpretasi (Pembahasan)

Analisis kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fakta-fakta mengenai fenomena atau kenyataan sosial yang ditemui di masyarakat, lalu melakukan analisa dan penafsiran hubungan fakta-fakta dengan isi dan konteks kebijakan serta melihat faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam program Raskin. Dengan adanya pendekatan kualitatif deskriptif dapat juga memudahkan peneliti untuk memperoleh data yang berkaitan dengan konsep judul dan tujuan penelitian.

Analisis data merupakan suatu cara pengelolaan data yang telah penulis peroleh selama melakukan penelitian dilapangan. Pengelolaan dimaksudkan untuk membuktikan keterangan empiris yang dikemukakan oleh penulis. Dalam penelitian ini, penulis menitikberatkan pada implementasi program beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) (studi kasus di Desa Parangbaddo).

Program beras untuk rumah tangga miskin (Raskin), merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu menyediakan sebagian kebutuhan pangan pokok keluarga miskin. Melalui pelaksanaan program Raskin bersama program

bantuan penanggulangan kemiskinan lainnya diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial rumah tangga. Selain itu program Raskin merupakan program transfer energi dalam bentuk kalori yang mendukung program lainnya seperti perbaikan gizi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas dan produktivitas keluarga miskin.

1. Proses Pendistribusian Beras Bersubsidi untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) di Desa Parangbaddo Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar

Berdasarkan hasil penelitian di atas titik distribusi adalah tempat yang dapat dijangkau keluarga sasaran penerima manfaat. Pelaksana distribusi adalah Aparat Desa/Kelurahan yang dibantu oleh warga masyarakat setempat dan ditunjukkan oleh kepala Desa/Kelurahan. Penentuan keluarga sasaran penerima manfaat adalah berdasarkan surat keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan pagu Raskin dan jumlah keluarga sasaran penerima manfaat melalui musyawarah Desa/Kelurahan menggunakan data dasar keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera. Musyawarah Desa/Kelurahan untuk memilih keluarga sasaran penerima manfaat melibatkan Aparat Desa/Kelurahan, (termasuk kepala Dusun/Lingkungan, RW, RT), anggota Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan, Institusi Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, tokoh masyarakat dan perwakilan keluarga miskin. Keluarga sasaran penerima manfaat yang dipilih dalam musyawarah Desa/Kelurahan yang dilampiri daftar keluarga sasaran penerima manfaat (format Model DPM-1) dan ditandatangani kepala Desa/Lurah serta disahkan oleh Camat setempat.

Proses pendistribusian Raskin adalah adanya alur secara bertahap atau melalui jalur administrasi kewilayahan yang ada di Kabupaten Takalar yaitumelalui Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Takalar, Kecamatan Polongbangkeng Utara, kemudian Desa/Kelurahan Parangbaddo hingga akhirnya dapat disalurkan langsung kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tahap	Wilayah	Pelaku/penanggung jawab
Tahap I	Pusat	Pusat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Menteri koordinator di bidang Kesejahteraan Rakyat.
Tahap II	Provinsi	Provinsi Tim Koordinasi Raskin Provinsi, Gubernur.
Tahap III	Kabupaten	Kabupaten Tim Koordinasi Raskin Kabupaten, Bupati.
Tahap IV	Kecamatan	Kecamatan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, Bupati/Walikota.
Tahap V	Kelurahan	Kelurahan Tim Koordinasi Raskin Kelurahan, Kepala Desa atau Lurah atau kepala pemerintah setingkat.
Masyarakat Penerima Raskin		

2. Indikator Enam Tepat (6T) Pelaksanaan Raskin pada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Desa Parangbaddo Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar

Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu Raskin bertujuan untuk

meningkatkan/membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.

a. Tepat Sasaran

Untuk menentukan rumah tangga sasaran RTS yang menjadi penerima manfaat program Raskin, haruslah ditentukan secara obyektif dan adil dan harus melibatkan semua komponen masyarakat setempat dan harus transparan agar masyarakat dapat terlibat dalam pengawasannya.

Dalam kenyataannya saat ini masih saja penerima manfaat yang bisa dikategorikan mampu, masih terdaftar namanya sebagai rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) di Pemerintah Pusat (Bupati Takalar) dan sebaliknya masyarakat yang benar-benar layak dan berpendapatan rendah untuk mendapatkan Raskin tidak tercantum namanya di Pemerintah Pusat meskipun pejabat Desa atau aparat penyalur Raskin telah mengirim data terbarunya ke Pemerintah Pusat. Dan sampai saat ini (Tahun 2017) data yang digunakan untuk pendistribusian Raskin masih saja menggunakan data lama (Tahun 2011).

b. Tepat Jumlah

Jika berpatokan pada Pedoman Umum Raskin (PEDUM RASKIN) 2016 yang 15 kg/bulan/kepala rumah tangga, ditakutkan jumlah beras yang sudah disepakati oleh pemerintah dan pihak Bulog untuk di distribusikan di Desa Parangbaddoyaitu 55 Karungsetiap pendistribusiannya, tidaklah cukup jika ingin di berikan ke rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) yang telah terdaftar, bisa saja nanti timbulnya permasalahan seperti ada yang dapat Raskin dan ada pula yang tidak dapat. Jadi

alangkah baiknya jika jumlahnya saja yang di kurangi namun semuanya bisa dapat Raskin secara merata yaitu hanya 14 liter atau 7 kg/karung/bulan/kepala rumah tangga.

c. Tepat Harga

Mengenai harga jual beli beras oleh penerima di setiap daerah bervariasi, umumnya lebih dari harga yang ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga harga juga dipengaruhi oleh kebijakan dalam memutuskan harga yang sebagian besar ditentukan oleh pelaksana lokal yaitu Kepala Desa. Harga tebusberas miskin (Raskin) yang ditetapkan oleh kepala Desa Parangbaddo dengan harga 27 rb/7 kg/karung per setiap pendistribusian.

d. Tepat Waktu

Mengenai waktu pelaksanaan pendistribusian Raskin pada dasarnya tidak adanya pemberitahuan dan penetapan waktu dari aparat penyalur Raskin kepada masyarakat penerima manfaat bahwasanya waktu yang selalu digunakan setiap kapan saja, apakah awal bulan, pertengahan bulan atau akhir bulan. Tapi dalam kenyataannya masih saja waktu penyaluran Raskin tidak menentu.

e. Tepat Kualitas

Mengenai kualitas beras yang di salurkan oleh Aparat penyalur Raskin ke masyarakat penerima manfaat, kami tidak tahu menahu soal itu karna apa yang kami dapatkan itu juga yang kami salurkan kepada masyarakat (ujar Kepala Lingkungan). Kualitas beras dapat dipengaruhi oleh karna sesuatu hal misalnya, lamanya pengiriman beras atau terlalu lamanya berastersimpan digudang sehingga itulah yang menjadi penyebab jeleknya kualitas beras.

f. Tepat Administrasi

Mengenai administrasi dalam pengambilan jatah beras sebaiknya memang dilakukan secara tunai agar dana yang telah terkumpul dari masyarakat penerima manfaat bisa juga secepatnya diberikan kepada Kepala Desa lalu kemudian dana tersebut di transfer ke Rekening Pihak Bulog agar pendistribusian Beras kedepannya bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan soal dana. Karna ada juga di suatu Wilayah jika terlambat atau lamanya mentransfer dana ke Rekening Bulog, maka terhambat pula pendistribusian Berasnya ke wilayah tersebut.

BAB. V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Proses pendistribusian Raskin yaitu adanya alur secara bertahap atau melalui jalur administrasi kewilayahan yang ada di Kabupaten Takalar yaitu melalui Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Takalar, Kecamatan Polongbangkeng Utara, kemudian Desa Parangbaddo hingga akhirnya dapat disalurkan langsung kepada masyarakat.
2. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa indikator Enam Tepat (6T) dalam pelaksanaan Raskin kepada masyarakat di Desa/Kelurahan Parangbaddo Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, belum berhasil tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Seperti halnya (6T) tepat sasaran pada mestinya dikarenakan pemerintah pusat (Bupati Takalar) masih menggunakan data tahun 2011 dan sampai saat ini (tahun 2017) belum ada pembaharuan data rumah tangga sasaran (RTS). Kemudian mengenai tepat jumlah karena tidak sesuai dengan ketentuan Pedoman Umum Raskin (PEDUM RASKIN) 2016 yang 15 kg/bulan/KK, sedangkan jumlah yang di salurkan di Desa Parangbaddo Kecamatan Polongbangkeng Utara hanya 14 liter atau 7 kg/bulan/KK. Dan mengenai kualitas beras yang rendah akibat kurangnya pengawasan pemerintah terhadap standar kualitas beras yang kemudian di distribusikan ke masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka peneliti mempunyai beberapa saran yang dapat diusulkan yaitu :

1. Pemerintah harus lebih maksimal dalam melakukan sosialisasi tentang Program Beras untuk Keluarga miskin (Raskin) terutama di tingkat Desa agar Pemerintah Desa dan seluruh masyarakat mengetahui dan memahami ketentuan program sehingga mematuhi ketentuan tersebut. Misalnya mengenai tepat jumlah, Pemerintah Desa harusnya bisa memberi tahukan kepada warga-warganya agar bisa memaklumi mengapa jumlah Raskin yang di salurkan tidak sesuai dengan ketentuan Pedoman Umum Raskin (PEDUM RASKIN) 2016 pada umumnya.
2. Mengenai dalam pelaksanaan program Raskin ini perlu adanya jalur koordinasi yang jelas baik antara Pemerintah Daerah dalam hal ini Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan juga dengan Perum Bulog sebagai penyedia stok beras Raskin, agar nantinya tidak terdapat miskomunikasi dan tumpang tindih kepentingan antara Lembaga tersebut dan diharapkan dalam setiap pelaksanaan kegiatannya terdapat control atau pengawasan oleh Pemerintah Setempat.
3. Mengenai penetapan daftar-daftar keluarga penerima manfaat RTS (rumah tangga sasaran) Pemerintah Desa seharusnya lebih optimal dan maksimal dalam mengatasi data-data yang lama (2011) di Pemerintah Pusat (Bupati Takalar) dan melakukan pembaharuan data-data yang telah di kumpulkan dari setiap masing-masing Lingkungan di Desa Parangbaddo. Pemerintah Pusat (Bupati Takalar) juga seharusnya tidak lagi menggunakan data-data yang lama (2011) untuk melakukan pendistribusian Raskin pada saat ini dan

seterusnya. Karena percuma juga Pemerintah Desa mengirimkan data-data tiap tahunnya ke Pemerintah Pusat (Bupati Takalar) apabila tidak di berlakukan data tersebut yang telah di kirim oleh pemerintah Desa. Saya harap pemerintah Pusat (Bupati Takalar) lebih bijaksana lagi dalam penetapan daftar-daftar keluarga penerima manfaat RTS (rumah tangga sasaran) terkhususnya di Desa Parangbaddo Kecamatan Polongbangkeng Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) *Kabupaten Takalar Dalam Angka 2017*.
- Badan Pusat Statistik (BPS) *Kecamatan Polongbangkeng Utara Dalam Angka 2017*.
- Badan Pusat Statistik (BPS) *Statistik Kabupaten Takalar 2017*.
- Dachi, R.A. 2017. *proses dan analisis kebijakan kesehatan*, Yogyakarta: Deepublish (CV Budi Utama).
- Data Kantor Desa Parangbaddo Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.
- DEPDAGRI. 2005. *menuju kesejahteraan*, Bogor Barat: Center For International Forestry Research.
- DEPDAGRI. 2009. *wajah DPR dan DPD 2009-2014*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Hanafie, Rita. 2010. *pengantar ekonomi pertanian*, Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Kemenkokesra. 2014. *Pedoman Umum Raskin*, (Online), Jakarta: Kemenkokesra, diakses 2 Februari 2018.
- Marshal Samsul. 2013. *efektifitas penyaluran program bantuan beras miskin (Raskin) (studi di Kecamatan Metro Pusat)*, usulan penelitian, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Stisipol) Dharma Wacana Metro.
- Nugroho, Riant. 2006. *kebijakan publik negara berkembang*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pedoman Umum Raskin 2016 (PEDUM RASKIN), Jakarta
- Rahmin Rahim. 2014. *kebijakan pemerintah dan penanganan kemiskinan (studi tentang implementasi program beras miskin (Raskin) di Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa tahun 2014)*, skripsi, Fakultas ushuluddin filsafat dan politik universitas UIN alauddin makassar.
- Undang-undang nomor 11 tahun 2009 pasal 19, 20, 21 tentang penanggulangan kemiskinan.*
- Undang-undang pangan (UU No. 7/1996) pasal 1 ayat 17 mendefinisikan ketahanan pangan.*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan.*

Winarno, Budi. 2012. *kebijakan publik*, Yogyakarta: Center Of Academic Publishing Service.

Winria Pitapurwati. 2014. *pelaksanaan penyaluran Raskin di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa*. skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

<https://galuhpriladewi.wordpress.com/2011/11/11/ketahanan-pangan/>, diakses 01 Maret 2018

<https://id.wikipedia.org/wiki/kemiskinan.Indonesia>, diakses 02 Februari 2018

<https://intiliputan.com/2018/01/19/bupati-takalar-lepas-21ton-rastra-untuk-kecamatan-polut-dan-sanrobone/>, diakses 02 Februari 2018

www.jurnalsocialsecurity.com>sosial, diakses 03 Februari 2018

**L
A
M
P
I
R
A
N**

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah pemberian atau penerima Raskin dilakukan sesuai tepat sasaran?
2. Apakah ketetapan jumlah beras yang di distribusikan ke titik sasaran sesuai dengan jumlah beras yang di tetapkan dalam pedoman umum Raskin 2016 ?
3. Apakah harga jual yang ditetapkan pemerintah sama dengan harga tebus Raskin (1600/kg) ?
4. Apakah waktu pelaksanaan penyaluran Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sesuai dengan mekanisme pelaksanaan penyaluran yang seharusnya 1 kali sebulan ?
5. Apakah kualitas beras sesuai dengan persyaratan kualitas beras inpres kebijakan perberasan yang berlaku ?
6. Apakah proses pembayaran Raskin (dalam pedoman Raskin 2016) dari RTS kepada pelaksana distribusi Raskin dilakukan secara tunai ?
7. Apakah faktor pendukung dalam penyaluran atau pendistribusian Raskin kepada masyarakat ?
8. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan program Raskin untuk masyarakat ?
9. Bagaimana proses pendistribusian Raskin untuk masyarakat penerima manfaat di Desa Parangbaddo ?

INFORMAN

1. Sirajuddin Bantang (Kepala Desa Parangbaddo)
2. Dg. Bani (Tokoh Masyarakat)
3. Kurnia Dg. Intang (Ibu Kepala Lingkungan)
4. Dg. Sawa (Masyarakat Penerima Raskin)
5. Dg. Bau (Masyarakat Penerima Raskin)
6. Dg. Saha (Masyarakat Penerima Raskin)
7. Tayu (Masyarakat Penerima Raskin)
8. Dg. Sitti (Masyarakat Penerima Raskin)
9. Sari Dg. Sunggu (Masyarakat Penerima Raskin)
10. Ma'do Dg. Bella (Masyarakat Penerima Raskin)

DOKUMENTASI



BIOGRAFI PENULIS



Nama Pratiwi Lahir di Takalar pada tanggal 28 Oktober 1994 dari pasangan suami istri Bapak Alimuddin dan Ibu Dinarti. Peneliti adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Perumahan Pabrik Gula Takalar, Desa Parangbaddo Kecamatan Polongbangkeng Utara Kota Takalar.

Pendidikan yang telah di tempuh oleh peneliti yaitu Menyelesaikan TK Sacharosa Pabrik Gula Takalar lulus pada tahun 2000, SDS Pabrik Gula Takalar lulus pada tahun 2007, SMPN 1 Polongbangkeng Utara lulus pada tahun 2010, SMK YPKK Limbung lulus pada tahun 2013, dan mulai tahun 2014 mengikuti program S1 Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Kampus Unismuh sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai Mahasiswi Program Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar.